

**PENGARUH *CORPORATE GOVERNANCE* TERHADAP
MANAJEMEN LABA**
(STUDI PADA PERUSAHAAN PERBANKAN DI BURSA EFEK INDONESIA
PERIODE 2004-2007)



Oleh :
Markus Triyantoro
200512052

SKRIPSI

Diajukan untuk melengkapi sebagian syarat-syarat
dalam Mencapai Gelar Sarjana Ekonomi
Program Studi Akuntansi

SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI
INDONESIA BANKING SCHOOL
JAKARTA

2009

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

Nama : Markus Triyantoro
NPM : 200512052
Judul Skripsi : Pengaruh *Corporate Governance* terhadap Manajemen Laba (Studi pada Perusahaan Perbankan di Bursa Efek Indonesia Periode 2004-2007)

Pembimbing Utama Skripsi

(Dr. Muchlis)

Pembimbing Pendamping Skripsi

(Ira Geraldina SE, Ak.)

Tanggal Lulus : 3 September 2009

Mengetahui

Ketua Panitia Ujian

(Dr. Siti Sundari)

Ketua Program Studi Akuntansi

(Etika Karyani, SE, Ak, MSM)

HALAMAN PERSETUJUAN PENGUJI KOMPREHENSIF

Nama : Markus Triyantoro
NPM : 200512052
Judul Skripsi : Pengaruh *Corporate Governance* terhadap Manajemen Laba (Studi pada Perusahaan Perbankan di Bursa Efek Indonesia Periode 2004-2007)

Tanggal Ujian Komprehensif : 3 September 2009

Penguji :

Ketua : Dr. Siti Sundari

Anggota : 1. Dr. Muchlis
2. Novy Silvia Dewi, SE, MM.

Menyatakan bahwa mahasiswa dimaksud di atas telah mengikuti ujian komprehensif :

Pada : 3 September 2009

Dengan Hasil : A

Penguji,

Ketua

(Dr. Siti Sundari)

Anggota I

Anggota II

(Dr. Muchlis)

(Novy Silvia Dewi, SE, MM)



KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat dan karuniaNya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **Pengaruh *Corporate Governance* terhadap Manajemen Laba (Studi pada Perusahaan Perbankan di Bursa Efek Indonesia periode 2004-2007)**

Maksud dari penyusunan skripsi ini adalah untuk memenuhi dan melengkapi salah satu syarat dalam menyelesaikan pendidikan pada program studi akuntansi Strata 1 di STIE Indonesia Banking School.

Penulis telah banyak menerima bantuan, bimbingan, petunjuk, saran, fasilitas, dan dukungan dari berbagai pihak dalam penyusunan dan penyelesaian skripsi ini. Atas semua itu, penulis menyampaikan terima kasih kepada :

1. Bapak Dr. Muchlis selaku dosen pembimbing utama skripsi yang telah meluangkan waktu dan pikirannya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.
2. Ibu Ira Geraldina, SE, Ak. selaku dosen pembimbing pendamping skripsi yang telah meluangkan waktu dan pikirannya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.
3. Ibu Dr. Siti Sundari selaku ketua STIE Indonesia Banking School dan Bapak Dr. Siswanto selaku mantan ketua STIE Indonesia Banking School.

4. Bapak Dr. Sugianto E. Aritonang selaku wakil ketua I bidang akademik STIE Indonesia Banking School dan Bapak Dr. Muchlis selaku mantan wakil ketua I bidang akademik STIE Indonesia Banking School.
5. Bapak Nugroho Endropranoto SE, MBA selaku wakil ketua II bidang keuangan STIE Indonesia Banking School.
6. Bapak Drs. Antyo Pracoyo, Msi selaku wakil ketua III bidang kemahasiswaan STIE Indonesia Banking School.
7. Ibu Etika Karyani, SE, Ak, MSM selaku ketua jurusan program studi akuntansi STIE Indonesia Banking School dan Bapak Sparta, SE, Ak, ME selaku mantan ketua jurusan program studi akuntansi STIE Indonesia Banking School.
8. Bapak Taufiq Hidayat, SE, Ak, M.BankFin selaku pembimbing akademik penulis.
9. Bapak Djoko S. Pinilih D.W., SE, MM, selaku Kepala Bagian Admin dan Umum
10. Seluruh staf pengajar STIE Indonesia Banking School atas ilmu dan bimbingan yang tak ternilai harganya.
11. Seluruh staf bagian akademik, bagian tata usaha dan bagian kemahasiswaan STIE Indonesia Banking School.
12. Kedua orang tua penulis dan seluruh keluarga penulis yang telah memberikan dukungan dan motivasi yang luar biasa sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

13. Sahabat-sahabat terbaik penulis : Maria Michelle Rosaria, Putri, Gita, Dindut, Anggi, Marissa, Phitienq, Deasy, Maya, Gilang, Donny, Apiek, Bayu, Nadya, Prita, Lia, Gamal, Nancy, Ika, Zaina, Yanri, Rizni, Irma, Firda, Nia, Tasya dan lain-lain yang telah membantu dan selalu memberikan semangat dalam menyelesaikan skripsi ini.
14. Seluruh teman-teman yang berjuang bersama penulis yang tidak dapat disebutkan satu persatu.
15. Rekan-rekan Senat Mahasiswa IBS masa bakti 2006-2007 yang telah memberikan pengalaman yang luar biasa. Semoga sukses selalu.
16. Rekan-rekan Dewan Mahasiswa IBS masa bakti 2007-2008 yang telah memberikan pengalaman yang luar biasa. Semoga sukses selalu.
17. Semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan, oleh sebab itu penulis mengharapkan saran dan kritik yang membangun demi perbaikan di masa yang akan datang. Penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis pada khususnya dan bagi pembaca pada umumnya.

Jakarta, Agustus 2009

Markus Triyantoro

ABSTRACT

The aim of this research is to examine the influence of corporate governance mechanisms namely board of independent commissioner's composition, board of commissioner's size, audit committee's size, institutional ownership, and company's size on the earnings management practice in public bank companies listed in Indonesia Stock Exchange. The earnings management of public bank companies detected by using specific accrual model from Beaver and Engel (1996). The samples of this research is the public banks companies listed in Indonesia Stock Exchange in the year 2004-2007 which have fulfilled the criteria.

By using multiple regression analysis as the research method, the results of this study show that (1) board of independent commissioner's composition had not significant influence to earnings management; (2) board of commissioner's size had not significant influence to earnings management; (3) audit committee's size had positive significant influence to earnings management; (4) institutional ownership had negative significant influence to earnings management; (5) company's size had not significant influence to earnings management; (6) simultaneously of board of independent commissioner's composition, board of commissioner's size, audit committee's size, institutional ownership, and company's size had significant influence to earnings management.

Keywords: *corporate governance, board of commissioner, audit committee, institutional ownership, company's size, earnings management*

LEMBAR PERNYATAAN KARYA SENDIRI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Markus Triyantoro

NPM : 200512052

Jurusan : Akuntansi

Dengan ini menyatakan bahwa hasil penelitian Skripsi yang telah saya buat ini merupakan hasil karya sendiri dan benar keasliannya. Apabila ternyata di kemudian hari penulisan skripsi ini merupakan hasil plagiat atau penjiplakan terhadap karya orang lain, maka saya bersedia mempertanggungjawabkan sekaligus bersedia menerima sanksi berdasarkan peraturan tata tertib STIE IBS.

Demikian pernyataan ini saya buat dalam keadaan sadar.

Penulis

(Markus Triyantoro)

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI	i
HALAMAN PERSETUJUAN PENGUJI KOMPREHENSIF.....	ii
KATA PENGANTAR	iii
<i>ABSTRACT</i>	vi
LEMBAR PERNYATAAN KARYA SENDIRI	vii
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TABEL	x
DAFTAR GAMBAR	xi
DAFTAR LAMPIRAN	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Identifikasi Masalah	7
1.3. Pembatasan Masalah.....	8
1.4. Perumusan Masalah	9
1.5. Tujuan Penelitian	9
1.6. Manfaat Penelitian	10
1.7. Sistematika Penulisan	10
BAB II LANDASAN PEMIKIRAN TEORITIS	12
2.1. Tinjauan Pustaka	12
2.1.1. Pengertian Bank	12
2.1.2. <i>Good Corporate Governance</i>	21
2.1.3. Teori Akuntansi Positif	31
2.1.4. Manajemen Laba	33
2.2. Kerangka Pemikiran	37
2.3. Hipotesis	41

BAB III METODE PENELITIAN	51
3.1. Waktu Penelitian.....	51
3.2. Metode Pengumpulan Data	51
3.2.1. Data Yang Dihimpun	51
3.2.2. Metode Pengambilan Sampel	52
3.2.3. Tehnik Pengumpulan Data	53
3.3. Metode Analisis Data	53
3.3.1. Tehnik Pengolahan Data	53
3.3.2. Tehnik Pengujian Hipotesis	57
 BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN	 66
4.1. Gambaran Umum Obyek Penelitian	66
4.2. Analisis Hasil Penelitian	71
4.2.1. Statistik Deskriptif	72
4.2.2. Pengujian Asumsi Klasik.....	75
4.2.3. Uji Signifikansi Parameter Individual	80
4.2.4. Uji Signifikansi Simultan.....	92
4.2.5. Koefisien Determinasi.....	93
4.3. Analisis Sensitivitas.....	95
4.3.1. Metode Selisih PPAP.....	97
4.3.2. Metode Selisih Laba Audit.....	102
 BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	 107
5.1. Kesimpulan	107
5.2. Saran	108
 DAFTAR PUSTAKA	 xiii
LAMPIRAN	xvi
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	xxxix

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1.	Operasionalisasi Variabel.....	58
Tabel 4.1.	Daftar Populasi Bank yang Terdaftar pada BEI.....	66
Tabel 4.2.	Seleksi Sampel.....	68
Tabel 4.3.	Daftar Bank-Bank sebagai Sampel Penelitian.....	70
Tabel 4.4.	Statistik Deskriptif.....	72
Tabel 4.5.	Hasil Uji Multikolinieritas.....	77
Tabel 4.6.	Hasil Uji Autokorelasi.....	78
Tabel 4.7.	Durbin Watson <i>Test Decision Rules</i>	78
Tabel 4.8.	Hasil Uji Heteroskedastisitas.....	80
Tabel 4.9.	Hasil Uji Statistik t.....	81
Tabel 4.10.	Hasil Uji Statistik F.....	93
Tabel 4.11.	Hasil Koefisien Determinasi.....	94
Tabel 4.12.	Koefisien Determinasi Model Beaver.....	95
Tabel 4.13.	Uji Statistik F Model Beaver.....	95
Tabel 4.14.	Koefisien Determinasi Model Selisih PPAP.....	99
Tabel 4.15.	Uji Statistik F Model Selisih PPAP.....	99
Tabel 4.16.	Uji Statistik t Model Selisih PPAP.....	100
Tabel 4.17.	Koefisien Determinasi Model Selisih Laba Audit.....	104
Tabel 4.18.	Uji Statistik F Model Selisih Laba Audit.....	104
Tabel 4.19.	Uji Statistik t Model Selisih Laba Audit.....	105

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1.	Kerangka Pemikiran.....	37
Gambar 4.1.	Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual.....	76



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1.	Komposisi Dewan Komisaris Independen dan Ukuran Dewan Komisaris.....	xv
Lampiran 2.	Ukuran Komite Audit, Kepemilikan Institusional dan Logaritma Natural Ukuran Perusahaan.....	xviii
Lampiran 3.	Nilai Discretionary Accrual.....	xxi
Lampiran 4.	Perbandingan Model Beaver dan Model Selisih PPAP.....	xxiv
Lampiran 5.	Perbandingan Model Beaver dan Model Selisih Laba Audit.	xxvii



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dalam teori keagenan (*agency theory*) dijelaskan bahwa hubungan agensi muncul ketika satu orang atau lebih (*principals*) mempekerjakan orang lain (*agent*) untuk memberikan suatu jasa dan kemudian mendelegasikan wewenang pengambilan keputusan kepada agen tersebut (Jensen, 1976 dalam Rudi, 2008). Agen sebagai pengelola perusahaan yang lebih banyak mengetahui informasi internal dan prospek perusahaan dibanding *principal*, dipekerjakan oleh *principal* untuk memaksimalkan kesejahteraan mereka. Namun, di sisi lain agen akan berusaha untuk memaksimalkan kesejahteraannya sendiri. Dari hal tersebut, maka timbullah *agency problem*. Dengan kata lain pemisahan antara kepemilikan dan pengelolaan suatu perusahaan dapat menimbulkan suatu masalah keagenan (*agency problem*).

Akuntansi adalah suatu sistem yang dapat memberikan informasi mengenai laporan keuangan dan informasi-informasi lain yang dibutuhkan oleh pihak internal maupun eksternal perusahaan. Informasi akuntansi, khususnya laporan keuangan sebagai hasil akhir dari proses akuntansi dirancang untuk memberikan informasi dalam pengambilan keputusan bisnis. Selain itu, laporan keuangan sebagai *output* dari model akuntansi merupakan media utama yang mempresentasikan aspek-aspek perusahaan, seperti kondisi keuangan dan hasil

operasi perusahaan, bagi penggunanya. Dalam hal ini, laporan keuangan menjadi alat utama bagi perusahaan untuk menyampaikan informasi keuangan mengenai pertanggungjawaban pihak manajemen.

Salah satu informasi yang terdapat dalam laporan keuangan adalah informasi mengenai laba perusahaan. Informasi laba sebagaimana dinyatakan dalam *Statement of Financial Accounting Concepts (SFAC)* Nomor 2 merupakan unsur utama dalam laporan keuangan dan sangat penting bagi pihak-pihak yang menggunakannya karena memiliki nilai prediktif. Berdasarkan penelitian awal yang dilakukan oleh Ball and Brown (1968) dalam Rudi (2008) ditemukan bahwa laba memiliki kandungan informasi yang sangat penting bagi pihak internal dan eksternal perusahaan. Bagi pemilik saham atau investor, laba berarti peningkatan nilai ekonomis (*wealth*) yang akan diterima, melalui pembagian dividen. Laba juga digunakan sebagai alat untuk mengukur kinerja manajemen perusahaan selama periode tertentu yang pada umumnya menjadi perhatian pihak-pihak tertentu terutama dalam menilai kinerja atas pertanggungjawaban manajemen dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepada mereka, serta dapat dipergunakan untuk memperkirakan prospeknya di masa depan.

Dikarenakan angka laba lazim digunakan sebagai alat ukur kinerja manajemen, maka timbullah suatu fenomena yang menunjukkan terjadinya skandal keuangan yang dilakukan oleh manajemen agar kinerjanya dinilai baik oleh para pengguna laporan keuangan. Laba sebagai bagian dari laporan keuangan tidak menyajikan fakta yang sebenarnya tentang kondisi ekonomis perusahaan, sehingga laba yang diharapkan dapat memberikan informasi untuk mendukung

pengambilan keputusan menjadi diragukan kualitasnya. Dalam mengelola perusahaannya, manajemen atau agen diberikan wewenang untuk mengelola perusahaan, begitupun dengan kebijakan-kebijakan akuntansi yang diambil oleh manajemen. Salah satu kebijakan akuntansi yang dilakukan oleh manajemen, berkaitan dengan bagaimana penerapan metode-metode atau kebijakan-kebijakan akuntansi untuk *me-manage* laba perusahaan dikenal dengan istilah manajemen laba. Dalam artikelnya Healy dan Wahlen (1998) menyatakan bahwa manajemen laba terjadi ketika manajemen menggunakan keputusan tertentu dalam laporan keuangan dan transaksi untuk mengubah laporan keuangan sebagai dasar kinerja perusahaan yang bertujuan menyesatkan pemilik atau pemegang saham (*principal*), atau untuk mempengaruhi hasil kontraktual yang mengandalkan angka-angka akuntansi yang dilaporkan.

Pada dasarnya, manajemen laba dapat terjadi karena manajer diberikan beberapa keleluasaan untuk menerapkan standar akuntansi keuangan yang memungkinkan manajer untuk memilih metode yang akan digunakan dalam mengungkapkan informasi keuangan yang dimilikinya tentang perusahaan. Selain itu, perilaku ini juga terjadi karena adanya asimetri informasi yang tinggi antara pihak manajemen dan pihak lain yang tidak mempunyai sumber, dorongan, atau akses yang memadai terhadap informasi untuk memonitor tindakan manajer (Richardson, 1998). Tindakan manajemen laba tersebut telah menimbulkan beberapa kasus skandal pelaporan akuntansi antara lain Enron, Merck, World Com dan mayoritas perusahaan lain di Amerika Serikat. Selain itu, di Indonesia juga terjadi hal serupa seperti PT. Lippo, Tbk dan PT. Kimia Farma,

Tbk juga melibatkan pelaporan keuangan yang berawal dari terdeteksinya adanya manipulasi (Gideon, 2005).

Hasil penelitian yang dilakukan oleh *Asian Development Bank* (ADB) menyimpulkan penyebab krisis di negara-negara Asia termasuk Indonesia disebabkan oleh pertama, akibat mekanisme pengawasan dewan komisaris (*board of director*) dan komite audit (*audit committee*) suatu perusahaan yang tidak berfungsi secara efektif dalam melindungi kepentingan pemegang saham. Kedua, akibat pengelolaan perusahaan yang belum profesional. Berdasarkan survei yang dilakukan Mc Kinsey & Co. terhadap 250 investor global dari tiga benua: AS, Eropa, dan Asia, pada pertengahan tahun 2000, diketahui bahwa penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) di Indonesia berada pada peringkat terendah. Peringkat penerapan GCG di Indonesia adalah 1,1 jauh lebih buruk dibanding Jepang, Taiwan, Korea, Thailand dan Malaysia. Dunia perbankan nasional juga tidak terlepas dari kealpaan di dalam menjalankan praktik GCG tersebut. Sejak peristiwa hantaman krisis multidimensi melanda Indonesia, wacana yang berkenaan dengan permasalahan tata kelola yang baik seketika menjadi *buzzword* yang hangat diperbincangkan. Keterpurukan luar biasa yang disebabkan peristiwa tersebut telah membuka mata bangsa ini bahwa salah satu faktor paling fundamental yang menyebabkan krisis tersebut terjadi tidak lain dikarenakan prinsip-prinsip GCG diabaikan (Wilson Arafat, 2007).

Dari beberapa contoh kasus tersebut, maka sangatlah relevan apabila ditarik suatu pertanyaan tentang bagaimana efektifitas penerapan *corporate governance*. *Corporate governance* merupakan konsep yang diajukan demi

peningkatan kinerja perusahaan melalui supervisi atau monitoring kinerja manajemen dan menjamin akuntabilitas manajemen terhadap *stakeholder* dengan mendasarkan pada kerangka peraturan. Konsep *corporate governance* diajukan demi tercapainya pengelolaan perusahaan yang lebih transparan bagi semua pengguna laporan keuangan. Sistem *corporate governance* memberikan perlindungan efektif bagi pemegang saham dan kreditor sehingga mereka yakin akan memperoleh *return* atas investasinya dengan benar. *Corporate governance* juga memberikan suatu struktur yang memfasilitasi penentuan sasaran-sasaran dari suatu perusahaan, dan sebagai sarana untuk menentukan teknik monitoring kinerja (Deni, Khomsiyah dan Rika, 2004).

Industri perbankan memiliki karakteristik yang berbeda dengan industri-industri lain seperti manufaktur, *consumer goods*, dan sebagainya. Industri perbankan memiliki sejumlah regulasi yang ketat. Hal ini disebabkan oleh peran bank sebagai lembaga kepercayaan masyarakat dimana bank menjalankan fungsinya sebagai lembaga intermediasi. Jika investor berkurang kepercayaannya karena laporan keuangan yang bias karena tindakan manajemen laba, maka mereka akan melakukan penarikan dana secara bersama-sama dan besar-besaran sehingga dapat mengakibatkan *rush*. Contoh dari salah satu regulasi dalam perbankan adalah adanya kewajiban bank untuk memenuhi rasio kecukupan modal yaitu minimum 8%. Rasio kecukupan modal ini atau CAR dapat digunakan sebagai salah satu alat ukur untuk menilai tingkat kesehatan dari suatu bank. Bank Indonesia menggunakan laporan keuangan bank sebagai dasar untuk menentukan status suatu bank apakah bank itu sehat atau tidak. Oleh karena itu, manajer

mempunyai insentif untuk melakukan manajemen laba supaya bank mereka dapat memenuhi persyaratan-persyaratan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. Setiawati dan Na'im (2001), dan Rahmawati dan Baridwan (2006) menunjukkan bahwa perbankan di Indonesia melakukan manajemen laba untuk memenuhi kriteria BI tersebut.

Penelitian ini menguji hubungan antara berbagai mekanisme *good corporate governance* yakni komposisi dewan komisaris independen, ukuran dewan komisaris, keberadaan komite audit, kepemilikan institusional serta ukuran perusahaan terhadap praktik manajemen laba yang dilakukan oleh industri perbankan di Indonesia. Beberapa penelitian empiris telah dilakukan untuk menguji hubungan antara pengaruh mekanisme *good corporate governance* terhadap praktik manajemen laba.

Peasnell *et al.* (1998) dalam Marihot (2007) meneliti efektifitas dewan komisaris dan komisaris independen terhadap manajemen laba yang hasilnya menunjukkan bahwa keberadaan komisaris independen membatasi pihak manajemen untuk melakukan manajemen laba. Beasley (1996) dalam Gideon (2005) menyarankan bahwa masuknya dewan komisaris yang berasal dari luar perusahaan meningkatkan efektifitas dewan tersebut dalam mengawasi kecurangan laporan keuangan. Beasley juga melaporkan bahwa pengaruh ukuran dewan komisaris terhadap kecurangan dalam laporan keuangan adalah positif.

Xie *et al.* (2003) dalam Marihot (2007) menguji efektifitas komite audit dalam mengurangi manajemen laba yang dilakukan oleh pihak manajemen. hasil yang diperoleh dari penelitian ini berupa kesimpulan bahwa komite audit yang

berasal dari luar mampu melindungi kepentingan pemegang saham dari tindakan manajemen laba yang dilakukan oleh pihak manajemen. Moh'd et al (1998) menyatakan bahwa investor institutional merupakan pihak yang dapat memonitor agen dengan kepemilikan yang besar sehingga motivasi manajer untuk mengatur laba menjadi berkurang. Penelitian yang dilakukan oleh Veronica dan Siddharta (2006) menyatakan bahwa ukuran perusahaan mempengaruhi tindakan manajemen laba dimana perusahaan-perusahaan kecil lebih cenderung melakukan manajemen laba dibandingkan perusahaan besar.

Penelitian mengenai efektifitas *corporate governance* dalam melindungi investor di Indonesia telah banyak dilakukan, antara lain: Midiastuty dan Machfoedz (2003), Veronica dan Bachtiar (2004), Wedari (2004), dan Wilopo (2004), Sugiarta (2004). Boediono (2005), Veronica dan Utama (2005), Veronica dan Siddharta (2006). Namun penelitian yang mereka lakukan mencakup perusahaan yang listing di Bursa Efek Indonesia (BEI) kecuali industri perbankan. Oleh karena itu, pada penelitian ini penulis ingin menguji efektifitas pengaruh mekanisme *good corporate governance* terhadap manajemen laba pada industri perbankan di Indonesia.

1.2. Identifikasi Masalah

Salah satu masalah keagenan yang terjadi karena adanya pemisahan antara pemegang saham dan manajemen perusahaan adalah manajemen laba. Manajemen laba ini dapat mengakibatkan bias pada laporan keuangan karena laba

yang dihasilkan dalam laporan keuangan tidak mencerminkan kinerja perusahaan yang sebenarnya.

Berdasarkan penelitian-penelitian terdahulu, praktik manajemen laba dapat dikurangi salah satunya melalui monitoring atau melaksanakan praktik *good corporate governance* antara lain dalam bentuk komposisi dewan komisaris independen, ukuran dewan komisaris, ukuran komite audit, kepemilikan institusional serta ukuran perusahaan. Oleh karena itu permasalahan yang akan diuji pada penelitian ini adalah pengaruh *good corporate governance* antara lain dalam bentuk komposisi dewan komisaris independen, ukuran dewan komisaris, ukuran komite audit, kepemilikan institusional, serta ukuran perusahaan terhadap praktik manajemen laba pada industri perbankan di Indonesia.

1.3. Pembatasan Masalah

Untuk memfokuskan penelitian ini, maka peneliti membatasi masalah yang akan diteliti yaitu:

1. Industri yang menjadi objek penelitian adalah industri perbankan.
2. Variable-variabel *good corporate governance* adalah komposisi dewan komisaris independen, ukuran dewan komisaris, ukuran komite audit, kepemilikan institusional, serta ukuran perusahaan.
3. Dalam mendeteksi manajemen laba digunakan model yang diajukan oleh Beaver dan Engel (1996). Model tersebut menggunakan komponen penyisihan kerugian piutang (*allowances for loan losses*) dan provisi

kerugian pinjaman sebagai komponen pembentuk total akrual dalam perusahaan perbankan.

1.4. Perumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

- 1) Apakah komposisi dewan komisaris independen memiliki pengaruh yang signifikan terhadap tindakan manajemen laba?
- 2) Apakah ukuran dewan komisaris memiliki pengaruh yang signifikan terhadap tindakan manajemen laba?
- 3) Apakah ukuran komite audit memiliki pengaruh yang signifikan terhadap tindakan manajemen laba?
- 4) Apakah kepemilikan institusional memiliki pengaruh yang signifikan terhadap tindakan manajemen laba?
- 5) Apakah ukuran perusahaan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap tindakan manajemen laba?
- 6) Apakah mekanisme *good corporate governance* secara bersama-sama memiliki pengaruh yang signifikan terhadap tindakan manajemen laba?

1.5. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk menguji secara empiris apakah mekanisme *good corporate governance* berpengaruh secara signifikan terhadap praktik manajemen laba pada industri perbankan di Indonesia.

1. 6. Manfaat Penelitian

- 1) Hasil penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi terhadap salah satu telaahan dalam bidang riset keuangan terutama dalam industri perbankan yaitu *corporate governance* dan manajemen laba.
- 2) Penelitian ini diharapkan dapat melengkapi penelitian-penelitian terdahulu yang pernah dilakukan sehubungan dengan *corporate governance* dan manajemen laba.
- 3) Penelitian ini diharapkan dapat memberikan suatu informasi yang berguna baik bagi perusahaan perbankan maupun bagi pihak-pihak terkait.

1. 7. Sistematika Penulisan

Bab I : Pendahuluan

Bab ini merupakan pendahuluan yang menjelaskan tentang hal-hal pokok yang berhubungan dengan penulisan skripsi, meliputi: latar belakang masalah, identifikasi masalah, pembatasan masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II : Landasan Pemikiran Teoritis

Bab ini berisi tinjauan pustaka, kerangka pemikiran serta hipotesis yang diajukan pada penelitian ini.

Bab III : Metode Penelitian

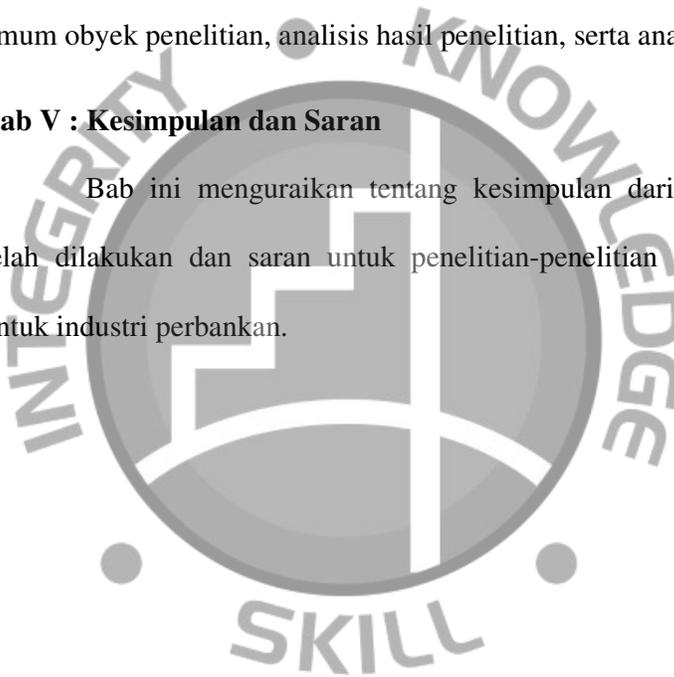
Bab ini menjelaskan metode-metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi, meliputi : waktu penelitian, metode pengumpulan data, serta metode analisis data.

Bab IV : Analisis dan Pembahasan

Bab ini menjelaskan tentang hasil penelitian meliputi gambaran umum obyek penelitian, analisis hasil penelitian, serta analisis sensitivitas.

Bab V : Kesimpulan dan Saran

Bab ini menguraikan tentang kesimpulan dari penelitian yang telah dilakukan dan saran untuk penelitian-penelitian selanjutnya serta untuk industri perbankan.



BAB II

LANDASAN PEMIKIRAN TEORITIS

2. 1. Tinjauan Pustaka

2. 1. 1. Pengertian Bank

Menurut UU No. 7 Tahun 1992 tentang perbankan sebagaimana telah diubah dengan UU No. 10 Tahun 1998 pasal 1 ayat 2 :

“ Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan, dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat banyak.”

Dari definisi di atas dapat disimpulkan bahwa bank merupakan lembaga keuangan yang kegiatannya adalah :

- 1) Menghimpun dana (uang) dari masyarakat dalam bentuk simpanan, maksudnya dalam hal ini bank sebagai tempat menyimpan uang atau berinvestasi bagi masyarakat. Tujuan utama masyarakat menyimpan uang biasanya adalah untuk keamanan uangnya. Sedangkan tujuan kedua adalah untuk melakukan investasi dengan harapan memperoleh bunga dari hasil simpanannya. Tujuan lainnya adalah untuk memudahkan melakukan transaksi pembayaran. Untuk memenuhi tujuan di atas, baik untuk mengamankan uang maupun untuk melakukan investasi, bank menyediakan sarana yang disebut dengan simpanan. Secara umum jenis simpanan yang ada di bank adalah simpanan giro (*demand deposit*), simpanan tabungan (*saving deposit*) dan simpanan deposito (*time deposit*).

- 2) Menyalurkan dana ke masyarakat, maksudnya adalah bank memberikan pinjaman (kredit) kepada masyarakat yang mengajukan permohonan. Pinjaman atau kredit yang diberikan dibagi dalam berbagai jenis sesuai dengan keinginan nasabah. Jenis kredit yang biasa diberikan oleh hampir semua bank adalah kredit investasi, kredit modal kerja, dan kredit perdagangan.
- 3) Memberikan jasa-jasa bank lainnya, seperti pengiriman uang (*transfer*), penagihan surat-surat berharga yang berasal dari dalam kota (*clearing*), penagihan surat-surat berharga yang berasal dari luar kota dan luar negeri (*inkaso*), *letter of credit (L/C)*, *safe deposit box*, bank garansi, *bank notes*, *travelers cheque* dan jasa lainnya. Jasa-jasa bank lainnya ini merupakan jasa pendukung dari kegiatan pokok bank yaitu menghimpun dan menyalurkan dana.

Sebagai perantara keuangan, bank akan memperoleh keuntungan dari selisih bunga yang diberikan penyimpan (bunga simpanan) dengan bunga yang diperoleh dari peminjam (bunga kredit). Keuntungan ini dikenal dengan istilah *spread based*. Jenis keuntungan ini diperoleh dari bank jenis konvensional. Sedangkan bagi bank jenis syariah tidak dikenal istilah bunga, karena bank syariah mengharamkan bunga. Dalam bank syariah, keuntungan yang diperoleh dikenal dengan istilah bagi hasil atau *profit sharing*.

Penggunaan dana bank pada prinsipnya dapat diklasifikasikan berdasarkan:

1) Prioritas penggunaan dana

Penggunaan dana bank dua prioritas pertama adalah dalam bentuk cadangan likuiditas yang terdiri dari cadangan primer dan cadangan sekunder.

- a. Cadangan primer atau *primary reserves* dimaksudkan antara lain untuk memenuhi ketentuan likuiditas wajib minimum dan untuk keperluan operasi bank sehari-hari termasuk untuk memenuhi semua penarikan simpanan dan permintaan kredit nasabah. Di samping itu, cadangan ini digunakan untuk penyelesaian kliring antar bank dan kewajiban-kewajiban lainnya yang harus segera harus dibayar. Cadangan primer ini terdiri dari uang kas yang ada dalam bank, saldo rekening giro pada bank sentral, dan bank-bank lainnya, warkat-warkat yang dalam proses penagihan. Komponen-komponen ini sering pula disebut sebagai *cash asset* atau alat-alat likuid.
- b. Prioritas kedua penggunaan dana adalah dalam bentuk cadangan sekunder atau *secondary reserves* yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan likuiditas yang jangka waktunya diperkirakan kurang dari satu tahun. Cadangan sekunder ini semata-mata dimaksudkan untuk kebutuhan likuiditas dan untuk memperoleh keuntungan. Karena kebutuhan-kebutuhan likuiditas ini tidak dapat diperkirakan, maka cadangan sekunder harus ditanamkan dalam bentuk surat-surat berharga jangka pendek yang mudah diperjual belikan. Di Indonesia instrumen

cadangan sekunder dapat berupa Sertifikat Bank Indonesia (SBI), Surat Berharga Pasar Uang (SBPU), dan Sertifikat Deposito.

- c. Penggunaan dana bank prioritas ketiga adalah pemberian kredit atau *loan* kepada nasabah yang memenuhi kebijakan perkreditan bank. Penyaluran kredit merupakan kegiatan utama bank. Oleh karena itu, sumber pendapatan utama bank berasal dari kegiatan usaha ini.
- d. Penggunaan dana bank prioritas keempat adalah penggunaan dana bank untuk investasi yaitu penanaman dana dalam bentuk surat-surat berharga yang berjangka panjang. Tujuan penggunaan dana ini semata-mata untuk memaksimalkan penghasilan. Instrumen untuk *investment* antara lain saham yang dibeli melalui bursa efek dan obligasi dengan berbagai jenisnya.

2) *Sifat aktiva bank*

Penggunaan dana bank berdasarkan sifat aktiva adalah pengalokasian dana ke dalam bentuk aktiva yang dapat memberikan hasil dan tidak memberikan hasil bagi bank yang bersangkutan. Penggunaan dana bank berdasarkan sifat aktiva dapat dibedakan sebagai berikut:

a. *Aktiva Tidak Produktif*

Aktiva tidak produktif atau *non earning assets* adalah penanaman dana ke dalam aktiva yang tidak memberikan hasil bagi bank terdiri dari:

1. Alat likuid atau *cash asset* adalah aktiva yang dapat digunakan setiap saat untuk memenuhi kebutuhan likuiditas bank. Aktiva bank yang

dapat digolongkan menjadi *cash assets* adalah: Kas, Giro pada Bank Sentral, dan Giro pada bank-bank lain.

2. Aktiva tetap dan inventaris. Dalam membiayai aktiva tetap dan inventaris, bank hanya diperkenankan menggunakan 50% dari total modalnya untuk membiayai seluruh kebutuhan aktiva tetap dan inventarisnya.

b. Aktiva Produktif

Aktiva produktif atau *earning assets* adalah semua penanaman dana dalam rupiah dan valuta asing yang dimaksudkan untuk memperoleh penghasilan sesuai dengan fungsinya. Pengelolaan dana dalam aktiva produktif merupakan sumber pendapatan yang dapat digunakan untuk membiayai keseluruhan biaya operasional bank termasuk biaya bunga, biaya tenaga kerja, dan biaya operasional lainnya. Komponen aktiva produktif bank terdiri dari:

1. Kredit yang diberikan. Pengertian kredit menurut UU No. 7 Tahun 1992 tentang perbankan sebagaimana telah diubah dengan UU No. 10 Tahun 1998 adalah:

“penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.”

2. Penempatan pada bank lain. Penempatan pada bank lain antara lain dalam bentuk *call money*, deposito berjangka, *deposit on call*, dan sertifikat deposito.

3. Surat-surat berharga. Penanaman dana dalam surat-surat meliputi surat-surat berharga jangka pendek dan jangka panjang yang dimaksudkan untuk mempertinggi profitabilitas bank. Penanaman dana dalam surat-surat berharga antara lain meliputi: Sertifikat Bank Indonesia (SBI), *Bankers Acceptance*, Surat Berharga Pasar Uang (SBPU), *Commercial Paper*, reksa dana, dan saham-saham yang terdaftar di Bursa Efek.
4. Penyertaan. Penyertaan adalah penanaman dana bank dalam bentuk saham pada perusahaan yang bergerak di bidang keuangan yang tidak melalui pasar modal, serta dalam bentuk penyertaan modal sementara pada perusahaan debitur untuk mengatasi kegagalan kredit.

Dalam Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 31/147/Kep/DIR tanggal 12 November 1998 disebutkan bahwa dalam rangka kesiapan menghadapi risiko kerugian, pengurus bank berkewajiban menjaga kualitas aktiva produktif sehingga dalam menetapkan kualitas aktiva produktif harus didasarkan pada prospek usaha, kondisi keuangan dengan penekanan pada arus kas debitur dan kemampuan membayar nasabah.

Kualitas kredit digolongkan menjadi lancar, dalam perhatian khusus, kurang lancar, diragukan dan macet. Penggolongan kualitas transaksi rekening administratif ditetapkan sesuai dengan penggolongan kualitas kredit.

Penggolongan kualitas surat berharga ditetapkan sebagai berikut:

a. Lancar

1. Sertifikat Bank Indonesia (SBI).
2. Surat Utang Pemerintah.
3. Surat Berharga Pasar Uang (SBPU) yang belum jatuh tempo.
4. Surat Berharga Komersial (*Commercial Paper*) yang belum jatuh tempo dengan peringkat IdA1 – IdA2 – IdA3 – IdA4 sebagaimana ditetapkan oleh PT. Pemeringkat Efek Indonesia (PT. Pefindo) atau yang setingkat dengan itu dari lembaga pemeringkat yang memiliki reputasi baik dan dikenal luas oleh masyarakat, obligasi yang dicatat dan diperdagangkan di Pasar Modal, belum jatuh tempo, dan kupon selalu dibayar dalam jumlah dan waktu yang tepat.
5. Sertifikat Reksadana yang memiliki prospek pengembalian serta mengikuti ketentuan untuk surat berharga komersial atau obligasi sebagaimana dimaksud dalam angka 3 dan angka 4 dan portofolionya tidak mengandung saham.
6. Surat Berharga lainnya seperti *Medium Term Note* yang mempunyai prospek pengembalian serta mengikuti ketentuan untuk surat berharga komersial atau obligasi sebagaimana dimaksud dalam angka 3 dan angka 4.

b. Macet

Apabila tidak memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam huruf

a.

Penggolongan kualitas penyertaan pada perusahaan yang bergerak di bidang keuangan dengan pangsa bank kurang dari 20% ditetapkan sebagai berikut:

- a. Lancar, perusahaan tempat penyertaan bank memperoleh laba dan tidak mengalami kerugian kumulatif berdasarkan laporan keuangan tahun buku terakhir yang telah diaudit.
- b. Kurang lancar, perusahaan tempat penyertaan bank mengalami kerugian sampai dengan 25% dari modal perusahaan berdasarkan laporan keuangan tahun buku terakhir yang telah diaudit.
- c. Diragukan, perusahaan tempat penyertaan bank mengalami kerugian lebih dari 25% sampai dengan 50% dari modal perusahaan berdasarkan laporan keuangan tahun buku terakhir yang telah diaudit.
- d. Macet, perusahaan tempat penyertaan bank mengalami kerugian lebih dari 50% dari modal perusahaan berdasarkan laporan keuangan tahun buku terakhir yang telah diaudit.

Penggolongan kualitas penyertaan pada perusahaan yang bergerak di bidang keuangan dengan pangsa bank 20% atau lebih maupun penyertaan modal sementara pada perusahaan debitur untuk mengatasi akibat kegagalan kredit,

digolongkan lancar dan penyertaan wajib dicatat dengan metode ekuitas. Penggolongan kualitas penempatan hanya didasarkan pada ketepatan pembayaran pokok dan bunga.

Kelangsungan kegiatan operasi bank sangat dipengaruhi pada kesiapan bank menanggung kemungkinan timbulnya risiko kerugian (*potential risk*) dalam kegiatannya menanamkan dana ke dalam berbagai alternatif investasi khususnya dalam aktiva produktif (*earning assets*). Untuk mengantisipasi terjadinya risiko kerugian, bank perlu membentuk penyesihan atau cadangan penghapusan aktiva produktif. Bank Indonesia mewajibkan semua bank membentuk penyesihan penghapusan aktiva produktif berdasarkan Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 31/148/KEP/DIR tanggal 12 November 1998.

Besarnya pembentukan penyesihan penghapusan aktiva produktif menurut ketentuan Bank Indonesia ditetapkan sebagai berikut:

- a. Cadangan umum PPAP ditetapkan sekurang-kurangnya 1% dari aktiva produktif yang digolongkan lancar, tidak termasuk Sertifikat Bank Indonesia dan Surat Utang Pemerintah.
- b. Cadangan khusus PPAP ditetapkan sekurang-kurangnya sebesar:
 1. 5% dari aktiva produktif yang digolongkan dalam perhatian khusus.
 2. 15% dari aktiva produktif yang digolongkan kurang lancar setelah dikurangi nilai agunan.
 3. 50% dari aktiva produktif yang digolongkan diragukan setelah dikurangi nilai agunan.

4. 100% dari aktiva produktif yang digolongkan macet setelah dikurangi nilai agunan.

2. 1. 2. *Good Corporate Governance*

2. 1. 2. 1. Teori-Teori Terkait

Dua teori utama yang terkait dengan *corporate governance* adalah *stewardship theory* dan *agency theory*. *Stewardship theory* dibangun di atas asumsi filosofis mengenai sifat manusia yakni bahwa manusia pada hakekatnya dapat dipercaya, mampu bertindak dengan penuh tanggung jawab, memiliki integritas dan kejujuran terhadap pihak lain. Inilah yang tersirat dalam hubungan fidusia yang dikehendaki para pemegang saham. Dengan kata lain, *stewardship theory* memandang manajemen sebagai pihak yang dapat dipercaya untuk dapat bertindak sebaik-baiknya bagi kepentingan publik pada umumnya maupun pemegang saham pada khususnya (Ahmad Daniri, 2006: 5).

Sementara itu, *agency theory* yang dikembangkan oleh Michael Johnson, seorang professor dari Harvard, memandang bahwa manajemen perusahaan sebagai “*agents*” bagi para pemegang saham, akan bertindak dengan penuh kesadaran bagi kepentingannya sendiri, bukan sebagai pihak yang arif dan bijaksana serta adil terhadap pemegang saham sebagaimana diasumsikan dalam *stewardship theory*. Bertentangan dengan *stewardship theory*, *agency theory* memandang bahwa manajemen tidak dapat dipercaya untuk bertindak sebaik-baiknya bagi kepentingan publik pada umumnya maupun pemegang saham pada

khususnya. Dengan demikian, “*managers could not be trusted to do their job – which of course is to maximize shareholder value*” (Tricker).

Dalam perkembangan selanjutnya, *agency theory* mendapat tanggapan lebih luas karena dipandang lebih mencerminkan kenyataan yang ada. Berbagai pemikiran mengenai *corporate governance* berkembang dengan bertumpu pada *agency theory* yang menyatakan bahwa pengelolaan perusahaan harus diawasi dan dikendalikan untuk memastikan bahwa pengelolaan dilakukan dengan penuh kepatuhan dan dikendalikan kepada berbagai peraturan dan ketentuan yang berlaku. Upaya ini menimbulkan apa yang disebut sebagai *agency costs*, yang menurut teori ini harus dikeluarkan sehingga biaya untuk mengurangi kerugian yang timbul karena ketidakpatuhan setara dengan peningkatan biaya *enforcement*-nya.

Agency costs ini mencakup biaya untuk pengawasan oleh pemegang saham; biaya yang dikeluarkan oleh manajemen untuk menghasilkan laporan keuangan yang transparan, termasuk biaya audit yang independen dan pengendalian internal; serta biaya yang disebabkan karena menurunnya nilai kepemilikan pemegang saham sebagai bentuk “*bonding expenditures*” yang diberikan kepada manajemen dalam bentuk opsi dan berbagai manfaat untuk tujuan menyelaraskan kepentingan manajemen dengan pemegang saham. Meskipun demikian, potensi untuk munculnya *agency problem* tetap ada karena adanya pemisahan antara kepengurusan dengan kepemilikan perusahaan, khususnya perusahaan-perusahaan publik.

2. 1. 2. 2. Definisi *Good Corporate Governance*

Sebagai sebuah konsep yang makin populer, GCG ternyata tak memiliki definisi tunggal. Berbagai definisi tersebut antara lain adalah:

1) *Cadbury Committee* (1992)

“GCG adalah prinsip yang mengarahkan dan mengendalikan perusahaan agar mencapai keseimbangan antara kekuatan serta kewenangan perusahaan dalam memberikan pertanggungjawabannya kepada para *shareholders* khususnya, dan *stakeholders* pada umumnya.”

2) *Center for European Studies* (CEPS)

“GCG merupakan seluruh sistem yang dibentuk mulai dari hak, proses, serta pengendalian, baik yang ada di dalam maupun di luar manajemen perusahaan.”

3) *Organization for Economic Co-operation and Development* (OECD)

“GCG sebagai cara-cara manajemen perusahaan bertanggungjawab pada *shareholder*-nya.

4) Menurut PBI No. 8/14/PBI/2006

“GCG adalah suatu tata kelola bank yang menerapkan prinsip-prinsip keterbukaan (*transparency*), akuntabilitas (*accountability*), pertanggungjawaban (*responsibility*), independensi (*independency*) dan kewajaran (*fairness*).

Di Indonesia, secara harfiah *governance* diterjemahkan sebagai pengaturan. Kemudian, GCG ini didefinisikan sebagai suatu pola hubungan, sistem, dan proses yang digunakan oleh organ perusahaan (Direksi, Dewan

komisaris, RUPS) guna memberikan nilai tambah kepada pemegang saham secara berkesinambungan dalam jangka panjang, dengan tetap memperhatikan kepentingan *stakeholder* lainnya, berlandaskan peraturan perundangan dan norma yang berlaku (Ahmad Daniri, 2006: 8)

2. 1. 2. 3. Prinsip-Prinsip Dasar *Good Corporate Governance*

Prinsip-prinsip dasar dari GCG menurut OECD adalah sebagai berikut:

1) *Transparency* (Keterbukaan Informasi)

Transparansi bisa diartikan sebagai keterbukaan informasi, baik dalam proses pengambilan keputusan maupun dalam mengungkapkan informasi material dan relevan mengenai perusahaan.

2) *Accountability* (Akuntabilitas)

Akuntabilitas adalah kejelasan fungsi, struktur, sistem dan pertanggungjawaban organ perusahaan sehingga pengelolaan perusahaan terlaksana secara efektif.

3) *Responsibility* (Pertanggungjawaban)

Pertanggungjawaban perusahaan adalah kesesuaian (kepatuhan) di dalam pengelolaan perusahaan terhadap prinsip korporasi yang sehat serta peraturan perundangan yang berlaku.

4) *Independency* (Kemandirian)

Independency atau kemandirian adalah suatu keadaan di mana perusahaan dikelola secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh/tekanan

dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat.

5) *Fairness* (Kesetaraan dan Kewajaran)

Secara sederhana kesetaraan dan kewajaran bisa didefinisikan sebagai perlakuan yang adil dan setara di dalam memenuhi hak-hak *stakeholder* yang timbul berdasarkan perjanjian serta peraturan perundangan yang berlaku.

2. 1. 2. 4. Manfaat Penerapan *Good Corporate Governance*

Terdapat beberapa manfaat dari adanya penerapan GCG pada perusahaan yaitu:

- 1) Penerapan GCG secara konsisten dan efektif akan mendukung suatu perusahaan dan atau negara yang ingin menuai manfaat dari pasar modal global.
- 2) Penerapan prinsip dan praktik GCG akan dapat meningkatkan keyakinan investor domestik terhadap perusahaan.
- 3) Mengurangi *agency cost*, yaitu suatu biaya yang harus ditanggung pemegang saham akibat pendelegasian wewenang kepada pihak manajemen. Biaya-biaya ini dapat berupa kerugian yang diderita perusahaan sebagai akibat penyalahgunaan wewenang, ataupun berupa biaya pengawasan yang timbul untuk mencegah terjadinya hal tersebut.
- 4) Mengurangi biaya modal (*cost of capital*), yaitu sebagai dampak dari pengelolaan perusahaan yang baik tadi menyebabkan tingkat bunga atas dana

atau sumber daya yang dipinjam oleh perusahaan semakin kecil seiring dengan turunnya tingkat risiko perusahaan.

- 5) Meningkatkan nilai saham perusahaan sekaligus dapat meningkatkan citra perusahaan di mata publik dalam jangka panjang.
- 6) Menciptakan dukungan para *stakeholder* dalam lingkungan perusahaan tersebut terhadap keberadaan perusahaan dan berbagai strategi serta kebijakan yang ditempuh perusahaan, karena umumnya mereka mendapat jaminan bahwa mereka juga mendapat manfaat maksimal dari segala tindakan dan operasi perusahaan dalam menciptakan kemakmuran dan kesejahteraan.

2. 1. 2. 5. Dewan Komisaris dan Komisaris Independen

Komisaris dipilih oleh dan bertanggungjawab kepada RUPS. Sebagai salah satu organ perusahaan, Dewan Komisaris harus memiliki tanggung jawab dan wewenang dalam mengawasi tindakan Direksi. Dewan Komisaris juga berhak memberi nasihat kepada Direksi jika sewaktu-waktu diperlukan. Dewan Komisaris mengawasi Direksi dalam hal melaksanakan tugas sebaik-baiknya demi kepentingan perusahaan dan pemegang saham, memastikan perusahaan selalu melaksanakan tanggung jawab sosialnya, dan memantau efektifitas penerapan GCG yang dilakukan perusahaan.

Dalam Peraturan Bank Indonesia No. 8/14/PBI/2006 tentang perubahan atas Peraturan Bank Indonesia No. 8/4/PBI/2006 tentang pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum Pasal 9 dijelaskan tugas serta tanggung jawab dari Dewan Komisaris yakni:

- 1) Dewan Komisaris wajib memastikan terselenggaranya pelaksanaan *Good Corporate Governance* dalam setiap kegiatan usaha bank pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.
- 2) Dewan Komisaris wajib melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi, serta memberikan nasihat kepada Direksi.
- 3) Dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Komisaris wajib mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis bank.
- 4) Dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Dewan Komisaris dilarang terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional bank, kecuali:
 1. Penyediaan dana kepada pihak terkait sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit.
 2. Hal-hal lain yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar Bank atau peraturan perundangan yang berlaku.
- 5) Pengambilan keputusan oleh Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (4), merupakan bagian dari tugas pengawasan oleh Komisaris sehingga tidak meniadakan tanggung jawab Direksi atas pelaksanaan kepengurusan Bank.

Dewan Komisaris terdiri dari Komisaris dan Komisaris Independen. Dalam Peraturan Bank Indonesia No. 8/14/PBI/2006 tentang perubahan atas Peraturan Bank Indonesia No. 8/4/PBI/2006 tentang pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum, paling kurang 50% dari jumlah anggota Dewan

Komisaris adalah Komisaris Independen. Komisaris Independen adalah anggota Dewan Komisaris yang tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, Direksi dan/atau pemegang saham pengendali atau hubungan dengan bank, yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen. Keberadaan Komisaris Independen dimaksudkan untuk mendorong terciptanya iklim dan lingkungan kerja yang lebih objektif dan menempatkan kewajaran dan kesetaraan di antara berbagai kepentingan termasuk kepentingan pemegang saham minoritas dan *stakeholders* lainnya.

2. 1. 2. 6. Komite Audit

Sejak direkomendasikan Bursa Efek Jakarta pada tahun 2000, Komite Audit telah menjadi komponen umum dalam struktur *corporate governance* perusahaan publik. Pada umumnya, komite ini berfungsi sebagai pengawas proses pembuatan laporan keuangan dan pengawasan internal. Dalam Keputusan Ketua Bapepam No. 29/PM/2004, komite audit adalah komite yang dibentuk oleh Dewan Komisaris dalam rangka membantu melaksanakan tugas dan fungsinya. Komite Audit bertugas untuk memberikan pendapat kepada Dewan Komisaris terhadap laporan atau hal-hal yang disampaikan oleh Direksi kepada Dewan Komisaris, mengidentifikasi hal-hal yang memerlukan perhatian Komisaris, dan melaksanakan tugas-tugas lain yang berkaitan dengan tugas Dewan Komisaris, antara lain meliputi:

- 1) Melakukan penelaahan atas informasi keuangan yang akan dikeluarkan perusahaan seperti laporan keuangan, proyeksi, dan informasi keuangan lainnya;
- 2) Melakukan penelaahan atas ketaatan perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan kegiatan perusahaan;
- 3) Melakukan penelaahan atas pelaksanaan pemeriksaan oleh auditor internal;
- 4) Melaporkan kepada Komisaris berbagai risiko yang dihadapi perusahaan dan pelaksanaan manajemen risiko oleh direksi;
- 5) Melakukan penelaahan dan melaporkan kepada komisaris atas pengaduan yang berkaitan dengan Emiten atau Perusahaan Publik; dan
- 6) Menjaga kerahasiaan dokumen, data dan informasi perusahaan.

Dalam Peraturan Bank Indonesia No. 8/4/PBI/2006, Komite Audit melakukan pemantauan dan evaluasi atas perencanaan dan pelaksanaan audit serta pemantauan atas tindak lanjut hasil audit dalam rangka menilai kecukupan pengendalian intern termasuk kecukupan proses pelaporan keuangan. Dalam rangka melaksanakan tugas, Komite Audit paling kurang melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap:

- a. Pelaksanaan tugas Satuan Kerja Audit Intern;
- b. Kesesuaian pelaksanaan audit oleh Kantor Akuntan Publik dengan standar audit yang berlaku;
- c. Kesesuaian laporan keuangan dengan standar akuntansi yang berlaku;
- d. Pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas hasil temuan Satuan Kerja Audit Intern, akuntan publik, dan hasil pengawasan Bank Indonesia.

Selain itu, Komite Audit wajib memberikan rekomendasi mengenai penunjukkan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada Rapat Umum Pemegang Saham.

Anggota Komite Audit paling kurang terdiri dari seorang Komisaris Independen, seorang dari Pihak Independen yang memiliki keahlian di bidang keuangan atau akuntansi dan seorang dari Pihak Independen yang memiliki keahlian di bidang hukum atau perbankan. Komite Audit itu sendiri diketuai oleh Komisaris Independen.

2.1.2.7. Kepemilikan Institusional

Kepemilikan institusional berkaitan dengan jumlah kepemilikan saham oleh investor institusi terhadap total jumlah saham yang beredar. Melalui mekanisme kepemilikan institusional, efektivitas pengelolaan sumber daya perusahaan oleh manajemen dapat diketahui dari informasi yang dihasilkan melalui reaksi pasar atas pengumuman laba.

Kepemilikan institusional memiliki kemampuan untuk mengendalikan pihak manajemen melalui proses monitoring secara efektif sehingga mengurangi tindakan manajemen melakukan manajemen laba. Persentase saham tertentu yang dimiliki oleh institusi dapat mempengaruhi proses penyusunan laporan keuangan yang tidak menutup kemungkinan terdapat akrualisasi sesuai kepentingan pihak manajemen (Gideon,2005).

2. 1. 2. 8. Ukuran Perusahaan

Ukuran perusahaan menunjukkan besar atau tidaknya suatu perusahaan. Ukuran perusahaan dapat dilihat dari total aktiva yang dimiliki oleh perusahaan. Perusahaan yang berukuran besar memiliki total aktiva yang besar dan sebaliknya perusahaan yang kecil memiliki total aktiva yang kecil pula.

Perusahaan yang besar lebih diperhatikan oleh masyarakat sehingga mereka akan lebih berhati-hati dalam melakukan pelaporan keuangan, sehingga berdampak perusahaan tersebut melaporkan kondisinya lebih akurat (Marihot, 2007). Dengan kata lain, perusahaan yang besar cenderung untuk tidak melakukan tindakan manajemen laba dan sebaliknya perusahaan yang kecil justru lebih cenderung untuk melakukan tindakan manajemen laba.

2. 1. 3. Teori Akuntansi Positif

Teori akuntansi positif menurut Scott (2006) adalah teori yang terkait dengan memprediksi tindakan pemilihan metode akuntansi yang dilakukan pembuat laporan keuangan dan bagaimana manajer merespon penerapan standar akuntansi yang baru. Dalam teori ini, sebuah perusahaan dipandang sebagai kumpulan dari kontrak-kontrak yang ada di perusahaan. Kontrak yang dimaksud adalah kontrak dengan karyawan, *supplier*, dan pemilik modal. Perusahaan tentu saja menginginkan biaya yang murah atas kontrak-kontrak tersebut atau dengan kata lain perusahaan menginginkan kontrak yang efisien. Teori ini memberikan kebebasan kepada pembuat laporan keuangan dalam melakukan pemilihan metode akuntansi. Hal ini dikarenakan jika teori ini memaksa para pembuat laporan

keuangan untuk mengadopsi satu metode akuntansi, hal tersebut menjadikan perusahaan tidak dapat meminimalkan biaya atas kontrak-kontrak tersebut sehingga biaya atas kontrak tersebut menjadi mahal. Akan tetapi, jika teori ini memberikan kebebasan kepada pembuat laporan keuangan, hal ini akan membuka kesempatan kepada pembuat laporan keuangan untuk melakukan tindakan *opportunistic* yang menguntungkan dirinya sendiri.

Dalam teori akuntansi positif, terdapat tiga hipotesis yang melatarbelakangi terjadinya manajemen laba (Watts dan Zimmerman, 1986), yaitu:

1) *Bonus Plan Hypothesis*

Dalam hipotesis ini, manajemen akan memilih metode akuntansi yang memaksimalkan utilitasnya yaitu bonus yang tinggi. Manajer perusahaan yang memberikan *earnings* lebih banyak menggunakan metode akuntansi yang meningkatkan laba yang dilaporkan. Dalam suatu perusahaan yang memiliki rencana pemberian bonus, maka seorang manajer perusahaan akan melakukan kenaikan laba saat ini yakni dengan memilih metode akuntansi yang mampu menggeser laba dari masa depan ke masa kini. Tindakan ini dilakukan dikarenakan manajer termotivasi untuk mendapatkan upah yang lebih tinggi untuk masa kini.

2) *Debt Covenant Hypothesis*

Hipotesis ini terkait dengan pemberian hutang dari kreditur kepada debitur. Kreditur memberikan batasan-batasan atau syarat yang harus dipenuhi oleh debitur. Agar tetap berada dalam batasan-batasan tersebut, manajemen

perusahaan melakukan pemindahan laba masa depan ke saat ini agar tetap mendapatkan pinjaman dari kreditur.

3) *Political Cost Hypothesis*

Hipotesis ini terkait dengan pemerintah. Dalam suatu perusahaan besar yang memiliki biaya politik tinggi, maka akan mendorong manajer untuk memilih metode akuntansi yang menangguhkan laba yang dilaporkan dari periode sekarang ke periode masa mendatang sehingga dapat memperkecil laba yang dilaporkan. Sebagai contoh, manajemen perusahaan melakukan pemindahan laba ke masa depan untuk menghindari pembayaran pajak atas laba yang besar pada tahun ini.

2.1.4. **Manajemen Laba**

Scott (2006) membagi cara pemahaman atas manajemen laba menjadi dua. Pertama, melihatnya sebagai perilaku oportunistik manajer untuk memaksimalkan utilitasnya dalam menghadapi kontrak kompensasi, kontrak hutang, dan *political costs* (*Opportunistic Earning Managements*). Kedua, dengan memandang manajemen laba dari perspektif *efficient contracting* (*Efficient Earnings Management*), manajemen laba memberi manajer suatu fleksibilitas untuk melindungi diri mereka dan perusahaan dalam mengantisipasi kejadian-kejadian yang tak terduga untuk kepentingan pihak-pihak yang terlibat dalam kontrak. Dengan demikian, manajer dapat mempengaruhi nilai pasar saham perusahaannya melalui manajemen laba, misalnya dengan membuat perataan laba (*income smoothing*) dan pertumbuhan laba sepanjang waktu. Singkat kata,

manajemen laba adalah pemilihan metode akuntansi untuk mencapai tujuan tertentu.

Scott (2006) mengemukakan adanya beberapa motivasi yang menyebabkan terjadinya manajemen laba, yaitu:

- a. *Bonus purposes*, di mana manajer yang memiliki informasi atas laba bersih perusahaan akan bertindak secara *opportunistic* untuk melakukan manajemen laba dengan memaksimalkan laba saat ini.
- b. *Political motivations*, di mana manajemen laba digunakan untuk mengurangi laba yang dilaporkan pada perusahaan publik. Perusahaan cenderung mengurangi laba yang dilaporkan karena adanya tekanan publik yang mengakibatkan pemerintah menetapkan peraturan-peraturan yang lebih ketat.
- c. *Taxation motivations*, di mana motivasi penghematan pajak menjadi motivasi manajemen laba yang paling nyata. Berbagai metode akuntansi digunakan dengan tujuan penghematan pajak pendapatan.
- d. Pergantian *CEO*. *CEO* yang mendekati masa pensiun akan cenderung menaikkan pendapatan untuk meningkatkan bonus mereka. Jika kinerja perusahaan buruk, mereka akan memaksimalkan pendapatan agar tidak diberhentikan.
- e. *Initial Public Offering (IPO)*. Perusahaan yang akan *go public* belum memiliki nilai pasar, dan menyebabkan manajer perusahaan yang akan *go public* melakukan manajemen laba dalam *prospectus* mereka dengan harapan dapat menaikkan harga saham perusahaan.

- f. Pentingnya memberi informasi kepada investor. Informasi mengenai kinerja perusahaan harus disampaikan kepada investor sehingga pelaporan laba perlu disajikan agar investor tetap menilai bahwa perusahaan tersebut dalam kinerja yang baik.

Terdapat empat pola manajemen laba, yaitu:

a. *Taking a Bath*

Pola ini dapat terjadi misalnya ketika manajer tidak dapat mencapai target yang ditargetkan. Manajer lebih baik mengakui rugi yang besar sekaligus karena tidak ada bedanya melaporkan rugi yang besar maupun yang kecil sehingga untuk periode selanjutnya manajer baru akan mengakui adanya keuntungan.

b. *Income Minimization*

Pola ini dilakukan pada saat perusahaan mengalami tingkat profitabilitas yang tinggi sehingga jika laba periode mendatang diperkirakan turun drastis maka dapat diatasi dengan mengambil laba periode sebelumnya.

c. *Income Maximization*

Pola ini dilakukan pada saat laba menurun. Tindakan *income maximization* dilakukan dengan tujuan untuk melaporkan *net income* yang tinggi agar manajer memperoleh bonus yang besar. Selain itu, pola ini dilakukan ketika terjadi penawaran saham perdana dan juga ketika perusahaan melakukan pelanggaran perjanjian hutang.

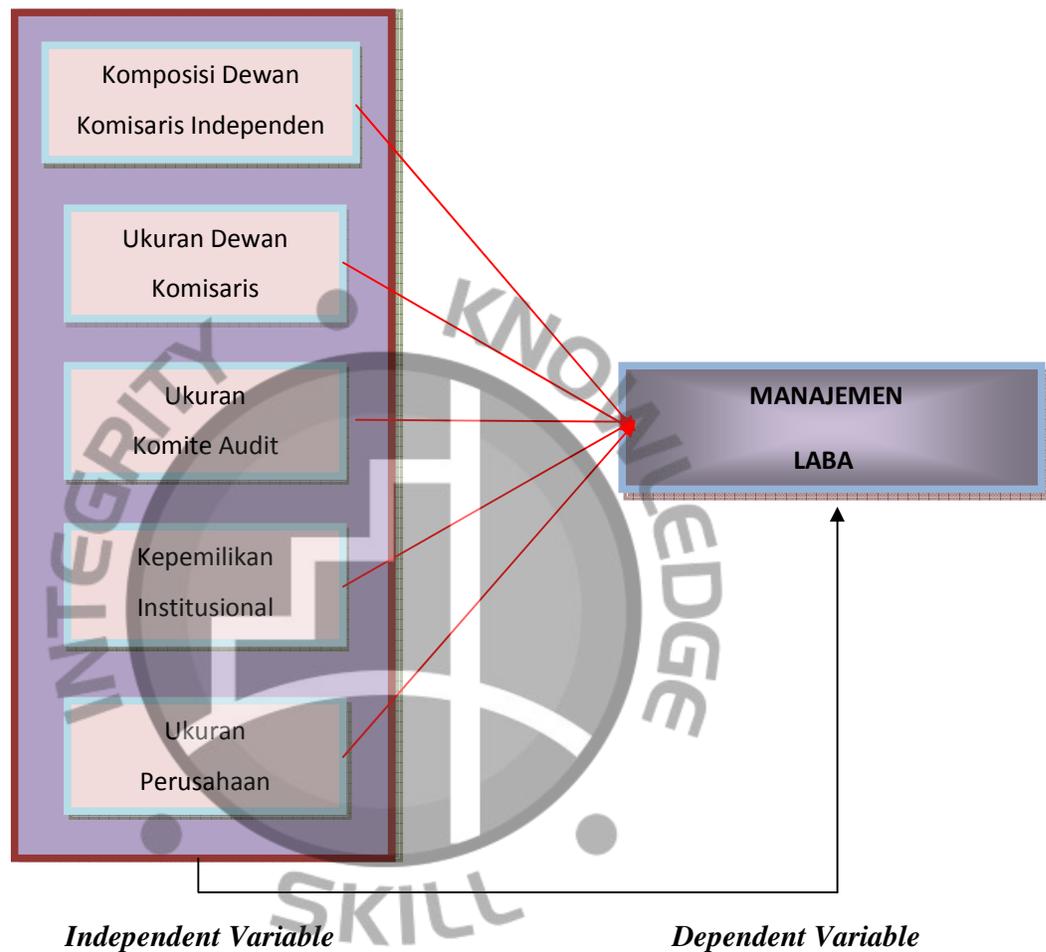
d. Income Smoothing

Pola ini dilakukan perusahaan dengan cara meratakan laba yang dilaporkan sehingga dapat mengurangi fluktuasi laba yang terlalu besar karena pada umumnya para investor lebih menyukai laba yang relatif stabil.



2. 2. Kerangka Pemikiran

Mekanisme *Good Corporate Governance*



Gambar 2.1 Hubungan Mekanisme GCG dengan Manajemen Laba

Pada penelitian ini, yang menjadi variabel independen adalah mekanisme *Good Corporate Governance* yang terdiri dari:

1) Komposisi Dewan Komisaris Independen

Definisi dari Komisaris Independen adalah anggota Dewan Komisaris yang tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham

dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, Direksi dan/atau pemegang saham pengendali atau hubungan dengan Bank, yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen. Variable ini diukur dengan persentase jumlah Komisaris Independen terhadap total Komisaris yang ada dalam susunan Dewan Komisaris perusahaan sampel.

2) Ukuran Dewan Komisaris

Variable ukuran Dewan komisaris diukur dengan total anggota Dewan Komisaris, baik yang berasal dari internal maupun eksternal pada perusahaan sampel.

3) Ukuran Komite Audit

Variable ukuran Komite Audit diukur dengan jumlah anggota komite audit yang terdapat pada perusahaan sampel baik yang berasal dari internal maupun eksternal perusahaan sampel.

4) Kepemilikan Institusional

Variable kepemilikan institusional diukur dengan persentase jumlah saham yang dimiliki oleh investor institusi pada perusahaan sampel terhadap total saham beredar perusahaan sampel.

5) Ukuran Perusahaan

Ukuran perusahaan diukur dengan nilai *logaritma natural* dari total aktiva perusahaan sampel.

Variabel dependen pada penelitian ini adalah manajemen laba. Pada penelitian ini, manajemen laba diproksikan oleh akrual kelolaan (*discretionary accrual*). Untuk mendeteksi akrual kelolaan pada perusahaan sampel yaitu perusahaan perbankan di Indonesia, maka digunakan model akrual khusus yaitu model Beaver dan Engel (1996). Menurut Rahmawati (2006), model ini adalah model yang sesuai untuk mendeteksi adanya manajemen laba pada industri perbankan (Marihhot dan Doddy, 2007). Model Beaver dan Engel dituliskan sebagai berikut:

$$NDA = \beta_0 + \beta_1 CO_{it} + \beta_2 LOAN_{it} + \beta_3 NPA_{it} + \beta_4 \Delta NPA_{it+1} + \varepsilon_{it}$$

Dimana:

CO_{it} : *loan charge offs* (pinjaman yang dihapus bukukan) pada bank i tahun t

$LOAN_{it}$: *loans outstanding* (pinjaman yang beredar) pada bank i tahun t

NPA_{it} : *non performing assets* (aktiva produktif yang bermasalah) pada bank i tahun t, terdiri dari aktiva produktif yang berdasarkan tingkat kolektibilitasnya digolongkan menjadi:

1. dalam perhatian khusus
2. kurang lancar
3. diragukan
4. macet

- ΔNPA_{it+1} : selisih *non performing assets* pada tahun t dengan
non performing assets t-1 pada bank i
- NDA_{it} : akrual non kelolaan (*non discretionary accrual*)
pada bank i tahun t

Sesuai dengan definisinya bahwa:

$$TA_{it} = NDA_{it} + DA_{it}$$

Dimana:

- TA_{it} : total akrual (*total accrual*) pada bank i tahun t
- NDA_{it} : akrual non kelolaan (*non discretionary accrual*)
pada bank i tahun t
- DA_{it} : akrual kelolaan (*discretionary accrual*) pada bank
i tahun t, maka

$$TA_{it} = \beta_0 + \beta_1 CO_{it} + \beta_2 LOAN_{it} + \beta_3 NPA_{it} + \beta_4 \Delta NPA_{it+1} + z_{it}$$

Dimana $z_{it} = DA_{it} + \varepsilon_{it}$

Dalam model Beaver dan Engel (1996) ini, angka total akrual diperoleh dari total saldo penyisihan penghapusan aktiva produktif (PPAP). Dalam penentuan koefisien manajemen laba tersebut, semua variabel dideflasi terlebih dahulu dengan nilai buku ekuitas dan cadangan kerugian pinjaman. Hal ini dilakukan untuk menghilangkan *size effect* dari setiap bank. Hal ini dikarenakan di dalam sampel terdapat kelompok bank yang tergolong besar dan juga kelompok bank yang tergolong kecil.

2. 3. Hipotesis

2. 3. 1. Komposisi Dewan Komisaris Independen terhadap Manajemen Laba

Karakteristik Dewan Komisaris secara umum dan khususnya komposisi Dewan Komisaris Independen dapat menjadi suatu mekanisme yang menentukan tindakan manajemen laba. Melalui peranannya dalam melakukan fungsi pengawasan terhadap operasional perusahaan oleh pihak manajemen, komposisi Dewan Komisaris Independen dapat memberikan kontribusi yang efektif terhadap hasil dari proses penyusunan laporan keuangan yang berkualitas atau kemungkinan terhindar dari kecurangan laporan keuangan. Dapat dikatakan bahwa komposisi Dewan Komisaris yang terdiri dari anggota yang berasal dari luar perusahaan mempunyai kecenderungan mempengaruhi manajemen laba (Beasley, 1996 dalam Gideon, 2005).

Beberapa penelitian terdahulu telah dilakukan untuk menguji pengaruh dari komposisi Dewan Komisaris Independen terhadap manajemen laba yakni penelitian yang dilakukan oleh Fama dan Jensen (1983) dalam Muh. Arif dan Bambang Agus (2007) yang menyatakan bahwa *non-executive director* (Komisaris Independen) dapat bertindak sebagai penengah dalam perselisihan yang terjadi di antara para manajer internal dan mengawasi kebijakan manajemen serta memberikan nasihat kepada manajemen. Komisaris Independen merupakan posisi terbaik untuk melaksanakan fungsi monitoring agar terciptanya perusahaan yang memiliki *good corporate governance*.

Hasil penelitian Dechow *et al.* (1996), Peasnell *et al.* (2001), Chtourou *et al.* (2001), Klein (2002), Xie *et al.* (2003) dalam Marihot (2007), Pratana dan

Mas'ud (2003), Marihot dan Doddy (2007), serta Muh. Arief dan Bambang Agus (2007) memberikan kesimpulan bahwa perusahaan yang memiliki proporsi anggota Dewan Komisaris yang berasal dari luar perusahaan dapat mempengaruhi tindakan manajemen laba sehingga jika anggota Dewan Komisaris Independen meningkatkan tindakan pengawasan, hal ini juga akan berhubungan dengan makin rendahnya *discretionary accrual* (Cornett *et al.*, 2006).

Penelitian terkait dengan keberadaan Dewan Komisaris di Indonesia juga telah banyak dilakukan. Veronica dan Utama (2005) serta Veronica dan Sidharta (2006) meneliti pengaruh praktik *corporate governance* terhadap manajemen laba. Praktik *corporate governance* yang diteliti yaitu proporsi Dewan komisaris Independen. Hasil dari penelitian ini adalah kesimpulan bahwa Dewan Komisaris Independen tidak terbukti berpengaruh terhadap manajemen laba yang dilakukan oleh perusahaan. Boediono (2005) meneliti apakah komposisi Dewan Komisaris berpengaruh terhadap manajemen laba. Hasil dari penelitian ini diketahui bahwa secara parsial pengaruh *corporate governance* dalam hal ini komposisi Dewan Komisaris tidak berpengaruh terhadap manajemen laba. Veronica dan Bachtiar (2004) menemukan bahwa variabel persentase Dewan Komisaris Independen tidak berkorelasi secara signifikan terhadap akrual kelolaan, walau begitu interaksi antar variabel akrual kelolaan dan Dewan Komisaris Independen menunjukkan koefisien positif yang signifikan terhadap *return* perusahaan. Hal tersebut dapat dijelaskan dengan makin tingginya persentase Dewan Komisaris Independen maka akrual kelolaan makin berpengaruh terhadap return.

Dari beberapa penelitian di atas, maka hipotesis dalam penelitian ini adalah:

Ho1 : Komposisi Dewan Komisaris Independen tidak berpengaruh secara signifikan terhadap manajemen laba.

Ha1 : Komposisi Dewan Komisaris Independen berpengaruh secara signifikan terhadap manajemen laba.

2. 3. 2. Ukuran Dewan Komisaris terhadap Manajemen Laba

Jensen (1993), Lipton dan Lorsch (1992) dalam Beiner, Drobetz, Schmid dan Zimmerman (2003) merupakan yang pertama menyimpulkan bahwa ukuran Dewan Komisaris merupakan bagian dari mekanisme *corporate governance*. Hal ini diperkuat oleh pendapat Allen dan Gale (2000) dalam Beiner *et al.* (2003) yang menegaskan bahwa Dewan Komisaris merupakan mekanisme *corporate governance* yang penting. Mereka juga menyarankan bahwa Dewan Komisaris yang ukurannya besar kurang efektif daripada yang ukurannya kecil. Penelitian yang dilakukan Yermarck (1996), Beasley (1996) dan Jensen (1993) dalam Gideon (2005) juga menyimpulkan bahwa Dewan Komisaris yang berukuran lebih kecil akan lebih efektif dalam melakukan tindakan pengawasan dibandingkan Dewan Komisaris berukuran besar. Ukuran Dewan Komisaris yang besar dianggap kurang efektif dalam menjalankan fungsinya karena sulit dalam komunikasi, koordinasi serta pembuatan keputusan.

Kondisi ini tidak diikuti oleh beberapa penelitian. Penelitian yang dilakukan Chtourou, Bedrad dan Courteau (2001), Yu (2006) dalam Marihot dan

Doddy (2007) menunjukkan hasil yang sebaliknya di mana ukuran Dewan Komisaris berpengaruh negatif terhadap manajemen laba. Hal ini menandakan bahwa semakin sedikit Dewan Komisaris maka tindakan manajemen laba makin banyak karena sedikitnya Dewan Komisaris memungkinkan bagi organisasi tersebut untuk didominasi oleh pihak manajemen dalam menjalankan perannya. Sementara itu penelitian yang dilakukan oleh Zhou dan Chen (2004) dalam Marihot dan Doddy (2007) menunjukkan bahwa ukuran Dewan Komisaris di bank komersial tidak berpengaruh terhadap *earning management* yang diukur dengan menggunakan *loan loss provisions*. Zhou dan Chen (2004) juga membagi kriteria manajemen laba tinggi dan rendah dan mengujinya secara terpisah. Pengujian tersebut menyimpulkan bahwa ukuran Dewan Komisaris secara signifikan berpengaruh dalam menghalangi tindak manajemen laba untuk perusahaan yang melakukan manajemen laba tinggi. Xie, Davidson, dan Dadalt (2003) juga menyatakan hal yang sama yaitu makin banyak Dewan Komisaris maka pembatasan atas tindak manajemen laba dapat dilakukan lebih efektif.

Penelitian terkait dengan ukuran Dewan Komisaris terhadap manajemen laba di Indonesia di antaranya dilakukan oleh Midiastuty dan Machfoedz (2003), Marihot dan Doddy (2007), dan Muh. Arief dan Bambang Agus (2007). Penelitian yang dilakukan Midiastuty dan Machfoedz serta Marihot dan Doddy (2007) menyimpulkan bahwa ukuran Dewan Komisaris berpengaruh secara signifikan terhadap indikasi manajemen laba yang dilakukan oleh pihak manajemen. pengaruh tersebut ditunjukkan dengan tanda positif. Hal tersebut berarti makin besar ukuran Dewan Komisaris maka makin banyak manajemen laba yang

dilakukan oleh perusahaan. Dari sini dapat disimpulkan bahwa jumlah Komisaris yang lebih sedikit lebih mampu mengurangi indikasi manajemen laba daripada jumlah komisaris yang banyak. Penelitian yang dilakukan Muh. Arief dan Bambang Agus (2007) menghasilkan kesimpulan yang sebaliknya di mana jumlah Dewan Komisaris tidak berpengaruh terhadap manajemen laba.

Dari beberapa penelitian di atas, maka hipotesis dalam penelitian ini adalah:

Ho2 : Ukuran Dewan Komisaris tidak berpengaruh secara signifikan terhadap manajemen laba.

Ha2 : Ukuran Dewan Komisaris berpengaruh secara signifikan terhadap manajemen laba.

2. 3. 3. Ukuran Komite Audit terhadap Manajemen Laba

Sejak direkomendasikan Bursa Efek Jakarta pada tahun 2000, Komite Audit telah menjadi komponen umum dalam struktur *corporate governance* perusahaan publik. Pada umumnya, komite ini berfungsi sebagai pengawas proses pembuatan laporan keuangan dan pengawasan internal. Beberapa penelitian telah dilakukan untuk menguji hubungan antara Komite Audit yang merupakan salah satu mekanisme *corporate governance* terhadap manajemen laba.

Xie, Davidson dan Dadalt (2003) dalam Marihot dan Doddy (2007) menguji efektifitas Komite Audit dalam mengurangi manajemen laba yang dilakukan oleh pihak manajemen. Hasil yang diperoleh dari penelitian tersebut berupa kesimpulan bahwa komite audit yang berasal dari luar mampu melindungi

kepentingan pemegang saham dari tindakan manajemen laba yang dilakukan oleh pihak manajemen. Begitu juga dengan penelitian yang dilakukan oleh Carcello *et al.* dalam Marihot dan Doddy (2007) yang menyelidiki hubungan antara keahlian Komite Audit di bidang keuangan dan manajemen laba. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa keahlian Komite Audit Independen di bidang keuangan terbukti efektif mengurangi manajemen laba.

Penelitian terkait dengan Komite Audit terhadap manajemen laba di Indonesia juga telah banyak dilakukan di antaranya oleh Veronica dan Utama (2005), Veronica dan Bachtiar (2004), Wedari (2004), Wilopo (2004), serta Marihot dan Doddy (2007). Hasil penelitian yang dilakukan oleh Veronica dan Bachtiar (2004), Wilopo (2004), serta Marihot dan Doddy (2007) menyimpulkan bahwa terdapat hubungan yang negatif antara keberadaan Komite Audit dengan manajemen laba. Hal ini berarti kehadiran Komite Audit mampu mempengaruhi secara negatif atau menghalangi praktik manajemen laba pada perusahaan. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Wedari (2004) bertolak belakang dengan hasil penelitian lain yang serupa, di mana Komite Audit berpengaruh positif dengan manajemen laba artinya keberadaan Komite Audit belum berhasil mengurangi manajemen laba karena keberadaan mereka manajer dapat melakukan manajemen laba dengan lebih leluasa. Sedangkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Veronica dan Utama (2005) melaporkan bahwa variabel keberadaan Komite Audit tidak berpengaruh terhadap manajemen laba perusahaan. Artinya keberadaan Komite Audit tidak mampu mengurangi manajemen laba yang terjadi di perusahaan.

Dari beberapa penelitian di atas, maka hipotesis dalam penelitian ini adalah:

Ho3 : Ukuran Komite Audit tidak berpengaruh secara signifikan terhadap manajemen laba.

Ha3 : Ukuran Komite Audit berpengaruh secara signifikan terhadap manajemen laba.

2. 3. 4. Kepemilikan Institusional terhadap Manajemen Laba

Kepemilikan saham oleh investor institusional atas saham perusahaan memiliki kemampuan untuk mengendalikan pihak manajemen melalui proses monitoring secara efektif sehingga mengurangi tindakan manajemen melakukan tindakan manajemen laba. Persentase saham tertentu yang dimiliki oleh institusi dapat mempengaruhi proses penyusunan laporan keuangan yang tidak menutup kemungkinan terdapat akrualisasi sesuai kepentingan pihak manajemen. (Gideon, 2005).

Beberapa penelitian telah dilakukan untuk menguji hubungan antara kepemilikan institusional yang merupakan salah satu mekanisme *corporate governance* terhadap manajemen laba seperti yang dilakukan oleh Bushee (1998), Rajgopal, Venkatachalam dan Jiambalvo (1999). Hasil penelitian mereka menunjukkan bahwa terdapat hubungan negatif antara kepemilikan oleh investor institusional dengan perilaku manajemen laba yang diukur dengan nilai *absolute* dari *discretionary accrual*. Hasil ini menunjukkan bahwa manajer mengakui bahwa investor institusional lebih banyak memiliki informasi dibanding investor

individual. Hal ini mengakibatkan motivasi manajer untuk *me-manage* laba menjadi berkurang sebab manajer sadar bahwa investor institusional tidak mudah untuk “dibodohi”. McConell dan Servaes (1990), Nesbitt (1994), Smith (1996), Del Guercio dan Hawkins (1999), dan Hartzell dan Starks (2003) dalam Cornett *et al.* (2006), menemukan adanya bukti yang menyatakan bahwa tindakan pengawasan yang dilakukan oleh sebuah perusahaan dan pihak investor institusional dapat membatasi perilaku para manajer. Cornett *et al.* (2006) menyimpulkan bahwa tindakan pengawasan perusahaan oleh pihak investor institusional dapat mendorong manajer untuk lebih memfokuskan perhatiannya terhadap kinerja perusahaan sehingga akan mengurangi perilaku oportunistik atau mementingkan diri sendiri.

Penelitian terkait dengan kepemilikan institusional terhadap manajemen laba di Indonesia juga telah banyak dilakukan di antaranya oleh Darmawati (2003), Midiastuty dan Machfoedz (2003), Veronica dan Bachtiar (2004), Wedari (2004), Fidyati (2004), Gideon (2005), Muh. Arief dan Bambang Agus (2007), serta Syaiful dan Nurul (2007). Hasil yang ditemukan oleh Midiastuty dan Machfoedz (2003) dan Fidyati (2004) menyimpulkan bahwa kepemilikan institusional dan manajemen laba memiliki pengaruh yang negatif secara signifikan. Hal ini berarti kepemilikan institusional dapat mengurangi tindakan manajemen laba yang dilakukan oleh manajemen perusahaan. Hasil yang ditemukan oleh Wedari (2004) dan Gideon (2005) menyimpulkan bahwa kepemilikan institusional memiliki pengaruh yang signifikan namun arahnya adalah positif. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi kepemilikan

institusional maka semakin tinggi pula motivasi manajemen untuk melakukan tindakan manajemen laba. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Darmawati (2003), Veronica dan Bachtiar (2004), Syaiful dan Nurul (2007), dan Muh. Arief dan Bambang Agus (2007) menghasilkan kesimpulan yang sebaliknya yaitu kepemilikan institusional tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap manajemen laba.

Dari beberapa penelitian di atas, maka hipotesis dalam penelitian ini adalah:

Ho4 : Kepemilikan institusional tidak berpengaruh secara signifikan terhadap manajemen laba

Ha4 : Kepemilikan institusional berpengaruh secara signifikan terhadap manajemen laba.

2.3.5. Ukuran perusahaan terhadap manajemen laba

Ukuran perusahaan menunjukkan besar atau tidaknya suatu perusahaan yang dapat dilihat dari total aktiva yang dimiliki oleh suatu perusahaan. Perusahaan yang berukuran besar memiliki total aktiva yang besar dan sebaliknya perusahaan yang kecil memiliki total aktiva yang kecil pula.

Beberapa penelitian telah dilakukan untuk menguji hubungan antara ukuran perusahaan terhadap manajemen laba seperti yang dilakukan oleh Peasnell, Pope, dan Young (1998), Chtourou, Bedard an Couteau (2001), Lee dan Choi (2002), Veronica dan Utama (2005) serta Veronica dan Siddharta (2006). Hasil penelitian mereka menyimpulkan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh negatif terhadap manajemen laba yang berarti semakin besar ukuran perusahaan

maka manajemen laba akan semakin kecil. Hal ini terjadi karena perusahaan yang besar lebih diperhatikan oleh masyarakat sehingga mereka akan berhati-hati dalam melakukan pelaporan keuangan, sehingga berdampak perusahaan tersebut melaporkan kondisinya lebih akurat. Selain itu, manajer yang memimpin perusahaan yang lebih besar memiliki kesempatan yang lebih kecil dalam memanipulasi laba dibandingkan dengan manajer di perusahaan kecil.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Rahmawati dan Baridwan (2006) menunjukkan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap manajemen laba perusahaan, sedangkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Marihot dan Doddy (2007) menunjukkan bahwa ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap manajemen laba pada industri perbankan di Indonesia.

Dari beberapa penelitian di atas, maka hipotesis dalam penelitian ini adalah:

Ho5 : Ukuran perusahaan tidak berpengaruh secara signifikan terhadap manajemen laba

Ha5 : Ukuran perusahaan berpengaruh secara signifikan terhadap manajemen laba.

BAB III

METODE PENELITIAN

3. 1. Waktu Penelitian

Penelitian yang dilakukan ini merupakan penelitian hipotesis. Penelitian hipotesis ini menjelaskan sifat hubungan tertentu atau menentukan perbedaan antar kelompok yang terkait dengan variabel (Uma Sekaran, 2006). Bank yang akan digunakan sebagai sampel dalam penelitian ini adalah bank umum yang *listed* di Bursa Efek Indonesia periode 2004-2007.

3. 2. Metode Pengumpulan Data

3. 2. 1. Data yang dihimpun

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini berupa laporan keuangan yang diterbitkan bank yang diperoleh dari *website* www.idx.co.id, perpustakaan Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia (LPPI) dan Pusat Referensi Pasar Modal di Bursa Efek Indonesia (BEI). Data-data yang diperlukan dalam penelitian ini yaitu:

- 1) Data *corporate governance* terkait Dewan Komisaris, Komisaris Independen dan Komite Audit.
- 2) Data terkait kepemilikan saham yakni kepemilikan institusional.
- 3) Data terkait ukuran perusahaan yakni total aktiva perusahaan.

- 4) Data terkait komponen manajemen laba seperti pinjaman yang dihapusbukukan, kredit yang diberikan, *non performing asset*, nilai buku ekuitas serta penyisihan penghapusan aktiva produktif (PPAP).

3. 2. 2. Metode Pengambilan Sampel

Metode pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah metode *purposive sampling* dengan tujuan untuk mendapatkan sampel yang representatif sesuai dengan kriteria-kriteria yang ditentukan. Adapun kriteria-kriteria untuk sampel dalam penelitian ini adalah:

- 1) Perusahaan perbankan yang sudah *go public* atau terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama periode 2004-2007.
- 2) Perusahaan menerbitkan laporan keuangan tahunan yang telah diaudit untuk periode 31 Desember 2004-2007.
- 3) Perusahaan tidak melakukan *delisting* selama periode 2004-2007.
- 4) Data yang tersedia lengkap secara keseluruhan, yang di dalamnya terdapat data mengenai pinjaman yang dihapusbukukan, pinjaman yang diberikan oleh Bank, aktiva produktif yang bermasalah, penyisihan penghapusan aktiva produktif, data mengenai Dewan Komisaris Bank, Komite Audit, data mengenai kepemilikan saham perusahaan sampel serta data terkait dengan ukuran perusahaan.

3. 2. 3. Tehnik Pengumpulan Data

Pada penelitian ini, data sekunder yang digunakan adalah laporan keuangan tahunan yang diterbitkan oleh perusahaan-perusahaan pada industri perbankan periode 2004 sampai dengan 2007. Data tersebut dikumpulkan dengan metode dokumentasi terhadap laporan keuangan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia yang diperoleh dari *website* www.idx.co.id, perpustakaan Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia (LPPI) dan Pusat Referensi Pasar Modal di Bursa Efek Indonesia (BEI).

3. 3. Metode Analisis Data

3. 3. 1. Tehnik Pengolahan Data

Setelah data-data yang diperlukan dalam penelitian ini diperoleh baik data yang terkait dengan GCG maupun manajemen laba, maka data-data tersebut selanjutnya akan diolah dengan melakukan beberapa langkah sebagai berikut:

1) Data komposisi Dewan Komisaris Independen.

Dalam laporan keuangan yang diterbitkan setiap tahunnya, terdapat informasi mengenai komposisi Dewan Komisaris baik yang berasal dari dalam perusahaan maupun dari luar perusahaan (independen). Komposisi Dewan Komisaris Independen diukur dari jumlah Komisaris Independen dibagi dengan jumlah Komisaris pada suatu bank. Komposisi Dewan Komisaris Independen ini disajikan dalam bentuk persentase.

2) Data Ukuran Dewan Komisaris

Ukuran Dewan Komisaris pada penelitian ini diperoleh dari data total anggota Dewan Komisaris yang terdapat pada suatu bank. Data ukuran Dewan Komisaris ini disajikan dalam bentuk jumlah atau nominal.

3) Data Ukuran Komite Audit

Data ini diperoleh dengan melihat jumlah anggota Komite Audit yang terdapat pada suatu bank. Data ukuran Komite Audit ini disajikan dalam bentuk jumlah atau nominal.

4) Data Kepemilikan Institusional

Data ini diperoleh dengan melihat jumlah saham yang dimiliki oleh investor institusional. Investor institusional dalam penelitian ini adalah investor yang memiliki persentase kepemilikan saham tertinggi atau jumlah saham terbanyak dibanding investor-investor lain. Data ini diukur dengan membagi jumlah saham yang dimiliki oleh investor institusional dengan jumlah saham beredar pada suatu bank. Data ini disajikan dalam bentuk persentase.

5) Data Ukuran Perusahaan

Data ini diperoleh dengan melihat total aktiva yang dimiliki oleh suatu bank. Agar tidak terjadi ketimpangan yang besar antara bank yang berukuran besar dan bank yang berukuran kecil, maka data total aktiva disajikan dalam bentuk logaritma natural.

6) Data manajemen laba

Pada penelitian ini, manajemen laba diproksikan dengan *discretionary accrual* dengan menggunakan model Beaver dan Engel, 1996. Model tersebut dituliskan sebagai berikut:

$$TA_{it} = NDA_{it} + DA_{it}$$

Dimana:

TA_{it} : total akrual (*total accrual*) pada bank i tahun t, yang diproksikan dengan saldo penyisihan penghapusan aktiva produktif (PPAP)

NDA_{it} : akrual non kelolaan (*non discretionary accrual*) pada bank i tahun t

DA_{it} : akrual kelolaan (*discretionary accrual*) pada bank i tahun t

Sebelum memperoleh *discretionary accrual*, terlebih dahulu dilakukan perhitungan untuk mencari nilai NDA yang dituliskan dalam model sebagai berikut:

$$NDA = \beta_0 + \beta_1 CO_{it} + \beta_2 LOAN_{it} + \beta_3 NPA_{it} + \beta_4 \Delta NPA_{it+1} + \epsilon_{it}$$

Dimana:

CO_{it} : *loan charge offs* (pinjaman yang dihapus bukukan) pada bank i tahun t, diperoleh dari selisih antara kredit yang dihapusbukukan periode berjalan dengan penerimaan kembali

kredit yang telah dihapusbukukan periode sebelumnya.

$LOAN_{it}$: *loans outstanding* (pinjaman yang beredar) pada bank i tahun t

NPA_{it} : *non performing assets* (aktiva produktif yang bermasalah) pada bank i tahun t, terdiri dari aktiva produktif yang berdasarkan tingkat kolektibilitasnya digolongkan menjadi:

1. dalam perhatian khusus
2. kurang lancar
3. diragukan
4. macet

ΔNPA_{it+1} : selisih *non performing assets* pada tahun t dengan *non performing assets* t-1 pada bank i

Sesuai dengan definisinya bahwa:

$$TA_{it} = NDA_{it} + DA_{it}$$

sehingga persamaan di atas menjadi sebagai berikut:

$$PPAP_{it} = \beta_0 + \beta_1 CO_{it} + \beta_2 LOAN_{it} + \beta_3 NPA_{it} + \beta_4 \Delta NPA_{it+1} + z_{it}$$

Dimana $z_{it} = DA_{it} + \epsilon_{it}$

Selanjutnya, langkah-langkah untuk mencari nilai *Discretionary Accrual* adalah sebagai berikut:

- a. Keseluruhan variabel di atas dideflasi terlebih dahulu terhadap *gross book value* yang diperoleh dari penjumlahan antara jumlah ekuitas dengan total PPAP.
- b. Melakukan regresi antara variabel PPAP dengan CO, LOAN, NPA, serta Δ NPA untuk memperoleh nilai z_{it} .
- c. Nilai z_{it} yang diperoleh selanjutnya akan digunakan sebagai *discretionary accrual* yang merupakan proksi dari manajemen laba.

3.3.2. Tehnik Pengujian Hipotesis

Pengujian hipotesis dalam penelitian ini dilakukan setelah pengolahan data-data terkait dengan *corporate governance* dan manajemen laba dilakukan. Dalam penelitian ini, *software* SPSS versi 16.0 digunakan untuk pengujian hipotesis. Secara singkat variabel-variabel yang terdapat dalam penelitian ini terdapat dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 3.1
Operasionalisasi Variabel

VARIABEL	KONSEP VARIABEL	INDIKATOR
<p>Independen: <i>Corporate governance</i></p>	<p>Sistem yang mengendalikan dan mengarahkan operasional perusahaan</p>	
1) Komposisi Dewan Komisaris Independen	1) Jumlah anggota Dewan Komisaris Independen terhadap total anggota Dewan Komisaris	1) Persentase jumlah anggota Dewan Komisaris Independen dari total anggota Dewan Komisaris
2) Ukuran Dewan Komisaris	2) Jumlah anggota Dewan Komisaris dalam suatu Bank	2) Jumlah anggota Dewan Komisaris dalam suatu Bank
3) Ukuran Komite Audit	3) Ukuran Komite Audit dalam suatu Bank	3) Jumlah anggota Komite Audit dalam suatu Bank
4) Kepemilikan Institusional	4) Jumlah kepemilikan saham oleh investor institusional terhadap total saham beredar	4) Persentase jumlah saham yang dimiliki investor institusional dari total saham beredar
5) Ukuran perusahaan	5) Ukuran perusahaan suatu Bank	5) Nilai <i>Logaritma Natural</i> dari jumlah aktiva yang dimiliki suatu Bank
<p>Dependen: Manajemen Laba</p>	<p>Akrualisasi laba berdasarkan kebijakan manajemen</p>	<p>Nilai dari <i>discreatinary accrual</i></p>

Dalam menguji hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode analisis regresi berganda. Berdasarkan hipotesis yang diajukan, maka model penelitian ini adalah sebagai berikut:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \beta_4 X_4 + \beta_5 X_5 + \varepsilon$$

atau

$$DA_{it} = \alpha + \beta_1 KDKI + \beta_2 UDK + \beta_3 UKA + \beta_4 KI + \beta_5 LnSize + \varepsilon$$

Keterangan:

α : Konstanta

β : Koefisien regresi

DA_{it} : *Discretionary accrual* (akrual kelolaan)

KDKI : Komposisi Dewan Komisaris Independen

UDK : Ukuran Dewan Komisaris

UKA : Ukuran Komite Audit

KI : Kepemilikan Institusional

$LnSize$: *Logaritma Natural* Ukuran Perusahaan

ε : koefisien *error*

Sebelum melakukan pengujian hipotesis, maka data yang diperoleh dalam penelitian ini akan diuji terlebih dahulu dengan uji asumsi klasik. Uji asumsi klasik tersebut perlu dilakukan agar hasil perhitungan dapat diinterpretasikan dengan akurat, efisien dan bebas dari kelemahan-kelemahan yang terjadi akibat gejala-gejala tersebut. Uji asumsi klasik yang dilakukan adalah sebagai berikut:

1) Uji normalitas.

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel terikat dan variabel bebas keduanya mempunyai distribusi normal ataukah tidak. Selain itu, tujuan dari uji normalitas ini adalah untuk mengetahui apakah dalam sebuah model regresi, variabel pengganggu atau residual mempunyai distribusi normal atau tidak. Metode yang digunakan untuk melakukan uji normalitas ini adalah dengan melihat *normal probability plot* yang membandingkan distribusi kumulatif dari data sesungguhnya dengan distribusi kumulatif dari distribusi normal. Distribusi normal akan membentuk satu garis lurus diagonal, dan plotting data akan dibandingkan dengan garis diagonal. Jika distribusi data adalah normal, maka garis yang menggambarkan data sesungguhnya akan mengikuti garis diagonalnya. Dasar pengambilan keputusan adalah jika data menyebar di sekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal, maka model regresi memenuhi asumsi normalitas. Sebaliknya, jika data menyebar jauh dari garis diagonal dan/atau tidak mengikuti arah garis diagonal, maka model regresi tidak memenuhi asumsi normalitas (Imam Ghazali, 2001).

2) Uji Multikolinieritas

Uji multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (*independent variables*). Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi di antara variabel bebas. Untuk mendeteksi ada atau tidaknya multikolinieritas di dalam suatu model regresi adalah sebagai berikut:

- a. Nilai R^2 yang dihasilkan oleh suatu estimasi model regresi empiris sangat tinggi, tetapi secara individual variabel-variabel bebas banyak yang tidak signifikan mempengaruhi variabel terikat.
- b. Menganalisis matriks korelasi variabel-variabel bebas. Jika antar variabel bebas ada korelasi yang cukup tinggi (umumnya di atas 0,90), maka hal ini merupakan indikasi adanya multikolinieritas.
- c. Multikolinieritas dapat juga dilihat dari nilai *tolerance* dan *variance inflation factor (VIF)*. *Tolerance* mengukur variabilitas variabel bebas yang terpilih tidak dapat dijelaskan oleh variabel bebas lainnya. Nilai *tolerance* yang rendah sama dengan nilai VIF tinggi (karena $VIF = 1/Tolerance$) dan menunjukkan adanya kolinieritas yang tinggi. Nilai *cutoff* yang umum dipakai adalah nilai *tolerance* 0,10 atau sama dengan nilai VIF di atas 10. Jika nilai *tolerance* lebih besar dari 0,10 atau nilai VIF lebih besar dari 10, maka terdapat gejala multikolinieritas (Imam Ghozali, 2001).

3) Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam suatu model regresi linear ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pada periode $t-1$ (sebelumnya). Salah satu cara untuk mendeteksi ada tidaknya autokorelasi adalah dengan menggunakan uji *Durbin-Watson (DW test)*. Pengambilan keputusan ada tidaknya autokorelasi adalah sebagai berikut:

1. Bila nilai DW terletak antara batas atas atau *upper bound* (du) dan $(4-du)$, maka koefisien autokorelasi sama dengan nol, berarti tidak ada autokorelasi).

2. Bila nilai DW lebih rendah daripada batas bawah atau *lower bound* (dl), maka koefisien autokorelasi lebih besar daripada nol, berarti ada autokorelasi positif.
3. Bila nilai DW lebih besar daripada (4-dl), maka koefisien autokorelasi lebih kecil daripada nol, berarti ada autokorelasi negatif.
4. Bila nilai DW terletak di antara batas atas (du) dan batas bawah (dl) atau DW terletak antara (4-du) dan (4-dl), maka hasilnya tidak dapat disimpulkan (Imam Ghozali, 2001).

4) Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan *variance* dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika *variance* dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain tetap, maka disebut homokedastisitas dan jika berbeda disebut heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah yang homokedastisitas atau tidak terjadi heteroskedastisitas. Metode yang digunakan untuk menguji heteroskedastisitas ini adalah uji Glejser. Ada atau tidaknya heteroskedastisitas dapat dilihat dengan cara mengabsolutkan nilai residual (AbsUt) pada menu *transform*. Variabel AbsUt selanjutnya diregresikan sebagai variabel dependen dengan seluruh variabel independen. Jika nilai signifikansi yang dihasilkan oleh masing-masing variabel independen dengan AbsUt sebagai variabel dependen lebih dari 0.05, maka dapat disimpulkan model regresi tidak mengandung adanya heteroskedastisitas (Imam Ghozali, 2001).

Setelah persamaan regresi terbebas dari asumsi dasar tersebut, maka selanjutnya dilakukan pengujian hipotesis dengan menggunakan analisis regresi berganda untuk mengukur kekuatan hubungan antara dua variabel atau lebih dan juga menunjukkan arah hubungan antara variabel dependen dan variabel independen. Ketepatan fungsi regresi sampel dalam menaksir nilai aktual dapat diukur dari *goodness of fit*-nya, yakni sebagai berikut:

1) Uji Signifikansi Parameter Individual (Uji *statistic t*)

Uji *statistic t* pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel independen secara individual dalam menerangkan variasi variabel dependen.

Hipotesis yang hendak diuji adalah:

$H_0 : b_i = 0$ (variabel independen bukan merupakan penjelas yang signifikan terhadap variabel dependen)

$H_a : b_i \neq 0$ (variabel independen merupakan penjelas yang signifikan terhadap variabel dependen)

Cara melakukan uji t adalah dengan membandingkan nilai statistik t dengan titik kritis menurut tabel. H_0 ditolak H_a diterima yaitu apabila $t_{hitung} > t_{tabel}$, atau apabila nilai signifikansi kurang dari nilai *alpha* 0,05, yang berarti variabel independen secara individual berpengaruh terhadap variabel dependen (Imam Ghozali, 2001).

2) Uji Signifikansi Simultan (Uji Statistik F)

Uji statistik F pada dasarnya menunjukkan apakah semua variabel bebas yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependen. Hipotesis yang hendak diuji adalah:

Ho : $b_1 = b_2 = \dots = b_k = 0$ (variabel independen bukan merupakan penjelas yang signifikan terhadap variabel dependen).

Ha : $b_1 \neq b_2 \neq \dots b_k \neq 0$ (semua variabel independen secara simultan merupakan penjelas yang signifikan terhadap variabel dependen).

Cara melakukan uji F adalah dengan membandingkan nilai F hasil perhitungan dengan nilai F menurut tabel. Ho ditolak Ha diterima yaitu apabila nilai $F_{hitung} > F_{tabel}$, atau apabila nilai signifikansi kurang dari nilai α 0,05, yang berarti variabel independen secara bersama-sama berpengaruh terhadap variabel dependen atau dapat dikatakan bahwa model regresi signifikan (Imam Ghozali, 2001).

3) Koefisien Determinasi

Koefisien determinasi (R^2) pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai koefisien determinasi adalah di antara nol dan satu. Nilai R^2 yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen amat terbatas, sedangkan nilai yang mendekati satu berarti variabel-variabel independen memberikan hampir semua variasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen. Kelemahan mendasar penggunaan koefisien determinasi adalah bias terhadap jumlah variabel independen yang dimasukkan ke dalam model. Setiap tambahan satu variabel independen, maka R^2 pasti meningkat tidak peduli apakah variabel tersebut berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen. Oleh karena itu, banyak peneliti

menganjurkan untuk menggunakan nilai *Adjusted R²* pada saat mengevaluasi mana model regresi terbaik. Tidak seperti R^2 , nilai *adjusted R²* dapat naik atau turun apabila satu variabel independen ditambahkan ke dalam model (Imam Ghozali, 2001).



BAB IV

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

4. 1. Gambaran Umum Obyek Penelitian

Obyek dalam penelitian ini adalah bank umum konvensional yang telah *go public* atau yang telah terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Sampai saat ini, bank yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia yaitu berjumlah 31 bank. Bank-bank yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia adalah sebagai berikut:

Tabel 4.1

Daftar Populasi Bank yang Terdaftar pada BEI

No	Nama Bank	Kode Emiten	Tanggal Listing
1.	Bank Agroniaga Tbk.	AGRO	8 Agustus 2003
2.	Bank Artha Graha Internasional Tbk.	INPC	23 Agustus 1990
3.	Bank Artha Niaga Kencana Tbk	ANKB	2 November 2000
4.	Bank Bukopin Tbk.	BBKP	10 Juli 2006
5.	Bank Bumi Artha Tbk.	BNBA	1 Juni 2006
6.	Bank Bumiputera Indonesia Tbk.	BABP	15 Juli 2002
7.	Bank Capital Indonesia Tbk.	BACA	4 Oktober 2007
8.	Bank Central Asia Tbk.	BBCA	31 Mei 2000
9.	Bank Century Tbk.	BCIC	25 Juni 1997
10.	Bank Danamon Indonesia Tbk.	BDMN	6 Desember 1989
11.	Bank Ekonomi Raharja Tbk.	BAEK	8 Januari 2008
12.	Bank Eksekutif Internasional Tbk.	BEKS	13 Juli 2001
13.	Bank Himpunan Saudara 1906 Tbk.	SDRA	15 Desember 2006
14.	Bank Internasional Indonesia Tbk.	BNII	21 November 1989

15.	Bank Kesawan Tbk.	BKSW	21 November 2002
16.	Bank Lippo Tbk.	LPBN	10 November 1989
17.	Bank Mandiri Tbk	BMRI	14 Juli 2003
18.	Bank Mayapada Internasional Tbk.	MAYA	29 Agustus 1997
19.	Bank Mega Tbk.	MEGA	17 April 2000
20.	Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.	BBNI	25 November 1996
21.	Bank Niaga Tbk.	BNGA	29 November 1989
22.	Bank NISP Tbk.	NISP	20 Oktober 1994
23.	Bank Nusantara Parahyangan Tbk.	BBNP	10 Januari 2001
24.	Bank Pan Indonesia Tbk.	PNBN	29 Desember 1982
25.	Bank Permata Tbk.	BNLI	15 Januari 1990
26.	Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.	BBRI	10 November 2003
27.	Bank Swadesi Tbk.	BSWD	1 Mei 2002
28.	Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk.	BTPN	12 Maret 2008
29.	Bank UOB Buana Tbk.	BBIA	28 Juli 2000
30.	Bank Victoria Internasional Tbk.	BVIC	30 Juni 1999
31.	Bank Windu Kentjana Internasional Tbk.	MCOR	3 Juli 2007

Sumber : www.idx.co.id

Berdasarkan metode *purposive sampling* yang digunakan dalam penelitian ini, terdapat beberapa kriteria yang telah ditetapkan dalam penggunaan sampel. Penyeleksian bank-bank yang akan menjadi sampel dalam penelitian ini disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 4.2
Seleksi Sampel

Kriteria sampel	Jumlah
Jumlah sampel awal	31
<p>Pengurangan sampel kriteria 1 Perusahaan perbankan yang sudah <i>go public</i> atau terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama periode 2004-2007.</p>	(7)
<p>Pengurangan sampel kriteria 2 Perusahaan menerbitkan laporan keuangan tahunan yang telah diaudit untuk periode 31 Desember 2004-2007.</p>	(0)
<p>Pengurangan sampel kriteria 3 Tidak melibatkan perbankan yang mengalami delisting selama periode 2004-2007</p>	(1)
<p>Pengurangan sampel kriteria 4 Data yang tersedia lengkap secara keseluruhan, yang di dalamnya terdapat data mengenai pinjaman yang dihapusbukukan, pinjaman yang diberikan oleh Bank, aktiva produktif yang bermasalah, penyisihan penghapusan aktiva produktif, data mengenai Dewan Komisaris Bank, Komite Audit, data mengenai kepemilikan saham perusahaan sampel serta data terkait dengan ukuran perusahaan.</p>	(2)
Jumlah sampel akhir	21

Sumber: Hasil Olahan Penulis

Berdasarkan kriteria-kriteria yang telah ditetapkan dalam penggunaan sampel, maka dari jumlah populasi sebanyak 31 bank yang terdapat pada industri perbankan, yang ditetapkan menjadi sampel dalam penelitian ini adalah 21 bank. Berdasarkan kriteria pertama dalam pemilihan sampel, terdapat 7 bank yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia setelah tahun 2004 yaitu Bank Bukopin Tbk, Bank Bumi Arta Tbk, Bank Capital Indonesia Tbk, Bank Ekonomi Raharja Tbk, Bank Himpunan Saudara Tbk, Bank Tabungan Pensiun Negara Tbk, dan Bank Windu Kentjana Internasional Tbk. Berdasarkan kriteria ketiga, terdapat satu bank yang melakukan delisting pada tahun 2007 yaitu Bank Arta Niaga Kencana Tbk. Berdasarkan kriteria keempat, terdapat dua bank yang tidak menyediakan data yang lengkap pada laporan keuangan yang diterbitkannya yaitu Bank Agroniaga Tbk dan Bank Eksekutif Internasional Tbk. Dari proses seleksi sampel, maka diperoleh 21 bank yang akan digunakan sebagai sampel dalam penelitian ini. Daftar bank yang digunakan sebagai sampel dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Tabel 4.3

Daftar Bank-Bank sebagai Sampel Penelitian

No	Nama Bank	Kode Emiten	Tanggal Listing
1.	Bank Artha Graha Internasional Tbk.	INPC	23 Agustus 1990
2.	Bank Bumiputera Indonesia Tbk.	BABP	15 Juli 2002
3.	Bank Central Asia Tbk.	BBCA	31 Mei 2000
4.	Bank Century Tbk.	BCIC	25 Juni 1997
5.	Bank Danamon Indonesia Tbk.	BDMN	6 Desember 1989
6.	Bank Internasional Indonesia Tbk.	BNII	21 November 1989
7.	Bank Kesawan Tbk.	BKSW	21 November 2002
8.	Bank Lippo Tbk.	LPBN	10 November 1989
9.	Bank Mandiri Tbk	BMRI	14 Juli 2003
10.	Bank Mayapada Internasional Tbk.	MAYA	29 Agustus 1997
11.	Bank Mega Tbk.	MEGA	17 April 2000
12.	Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.	BBNI	25 November 1996
13.	Bank Niaga Tbk.	BNGA	29 November 1989
14.	Bank NISP Tbk.	NISP	20 Oktober 1994
15.	Bank Nusantara Parahyangan Tbk.	BBNP	10 Januari 2001
16.	Bank Pan Indonesia Tbk.	PNBN	29 Desember 1982
17.	Bank Permata Tbk.	BNLI	15 Januari 1990
18.	Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.	BBRI	10 November 2003
19.	Bank Swadesi Tbk.	BSWD	1 Mei 2002
20.	Bank UOB Buana Tbk.	BBIA	28 Juli 2000
21.	Bank Victoria Internasional Tbk.	BVIC	30 Juni 1999

Sumber : www.idx.co.id

4. 2. Analisis Hasil Penelitian

Analisis hasil penelitian pada penelitian ini dibagi menjadi lima tahap. Tahap pertama adalah analisis deskriptif untuk mendeskripsikan variabel-variabel yang terdapat dalam penelitian ini. Tahap kedua adalah analisis uji asumsi klasik untuk melihat apakah variabel-variabel yang terdapat dalam penelitian ini terbebas dari kelemahan-kelemahan akibat uji asumsi klasik. Tahap ketiga adalah analisis uji signifikansi Parameter Individual (Uji *statistic t*) untuk menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel independen secara individual dalam menerangkan variasi variabel dependen. Tahap keempat adalah analisis uji signifikansi simultan dan tahap kelima adalah analisis koefisien determinasi untuk menunjukkan apakah semua variabel bebas yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependen serta mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen.

4. 2. 1. Statistik Deskriptif

Tabel 4.4
Statistik Deskriptif

	N	Mean	Std Deviasi	Min	Max
DA	84	2.1048E-16	0.975606083	-1.57152	2.99855
KDKI	84	0.47	0.1269189	0.2	0.75
UDK	84	5.73	2.30427	2	10
UKA	84	3.73	1.205921	2	8
KI	84	0.52	0.213223	0.1132	0.9912
LnSIZE	84	30.6047	1.58866	27.44317	33.39648

Sumber: Hasil Olahan Penulis

Dari tabel di atas, dapat dilihat bahwa jumlah sampel yang digunakan untuk penelitian ini adalah 84. Sampel tersebut diperoleh dengan mengalikan antara 21 perusahaan sampel dengan jumlah tahun pengamatan yaitu 4 tahun. Sampel tersebut diperoleh dengan menggunakan metode *pooled data*.

Rata-rata (*mean*) dari *discretionary accrual* yang digunakan sebagai proksi dari manajemen laba adalah 2.1048E-16. Hal ini berarti rata-rata dari

manajemen laba yang dilakukan oleh industri perbankan adalah $2.1048E-16$ dari nilai buku ekuitas dan PPAP. Tabel tersebut juga menunjukkan nilai minimum dari manajemen laba yang dilakukan oleh industri perbankan adalah $-1,57152$. Angka tersebut menunjukkan bahwa nilai terendah dari manajemen laba yang dilakukan oleh industri perbankan adalah $-1,57152$ atau dapat dikatakan bahwa bank tersebut melakukan tindakan manajemen laba dengan pola *income minimization* (penurunan laba) sebesar $1,57152$ dari nilai buku ekuitas dan PPAP. Sedangkan nilai maksimum dari manajemen laba yang dilakukan oleh industri perbankan adalah $2,99855$. Angka tersebut menunjukkan bahwa nilai maksimum dari manajemen laba yang dilakukan oleh industri perbankan adalah $2,99855$ atau dapat dikatakan bahwa bank tersebut melakukan tindakan manajemen laba dengan pola *income maximization* (penaikan laba) sebesar $2,99855$ dari nilai buku ekuitas dan PPAP. Hasil penelitian lebih lanjut menunjukkan bahwa $59,52\%$ sampel (50 sampel dari total 84 sampel) pada penelitian ini melakukan manajemen laba dengan pola *income minimization* atau penurunan laba dan sebesar $40,48\%$ sampel (34 sampel dari total 84 sampel) pada penelitian ini melakukan manajemen laba dengan pola *income maximization* atau penaikan laba (data terlampir). Dari hasil penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa industri perbankan pada tahun pengamatan 2004 sampai dengan 2007 lebih banyak melakukan tindakan manajemen laba yaitu dengan pola *income minimization* atau penurunan laba.

Rata-rata (*mean*) dari komposisi dewan komisaris independen terhadap jumlah anggota dewan komisaris pada sampel dalam penelitian ini adalah $0,47$

atau 47%. Angka ini hampir mendekati ketentuan dari Bank Indonesia yang mensyaratkan bahwa proporsi dewan komisaris independen paling kurang 50% dari jumlah anggota dewan komisaris sebagaimana tertuang dalam Peraturan Bank Indonesia No. 8/14/PBI/2006 tentang perubahan atas Peraturan Bank Indonesia No. 8/4/PBI/2006 tentang pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum. Nilai minimum atau terendah dari komposisi dewan komisaris independen terhadap jumlah anggota dewan komisaris adalah 0,2 atau 20%. Sedangkan nilai maksimum dari komposisi dewan komisaris independen terhadap jumlah anggota dewan komisaris adalah 0,75 atau 75%. Hasil penelitian lebih lanjut menunjukkan bahwa 42,86% sampel (36 sampel dari total 84 sampel) masih belum memenuhi ketentuan Bank Indonesia mengenai proporsi dari komisaris independen atau masih di bawah 50%, sedangkan sebesar 57,14% (48 sampel dari 84 sampel) telah memenuhi ketentuan Bank Indonesia mengenai proporsi dewan komisaris independen terhadap jumlah anggota dewan komisaris atau di atas 50% (data terlampir).

Rata-rata (mean) dari ukuran dewan komisaris pada sampel dalam penelitian ini adalah 5,73 atau sekitar 5 orang. Nilai terendah dari ukuran dewan komisaris dalam penelitian ini adalah sebanyak 2 orang, sedangkan nilai maksimum dari ukuran dewan komisaris dalam penelitian ini adalah sebanyak 10 orang.

Rata-rata (mean) dari ukuran komite audit yang diprosikan dalam jumlah anggota komite audit yang terdapat dalam sampel penelitian ini adalah sebanyak 3,73 atau sekitar 3 orang. Angka ini telah memenuhi ketentuan dari

Bank Indonesia mengenai jumlah minimal anggota komite audit yakni minimal sebanyak 3 orang. Nilai minimum jumlah anggota komite audit pada sampel dalam penelitian ini adalah sebanyak 2 orang, sedangkan nilai maksimal jumlah anggota komite audit pada sampel dalam penelitian ini adalah sebanyak 8 orang. Hasil penelitian lebih lanjut menunjukkan sebesar 96,43% sampel (81 sampel dari total 84 sampel) telah memenuhi ketentuan Bank Indonesia mengenai jumlah anggota komite audit minimal 3 orang, sedangkan 3,57% sampel (3 sampel dari total 84 sampel) belum memenuhi ketentuan Bank Indonesia mengenai jumlah minimal anggota komite audit.

Rata-rata (*mean*) dari *LnSize* yang digunakan sebagai proksi dari ukuran perusahaan pada sampel dalam penelitian ini adalah 30,6047. Nilai terendah dari *LnSize* pada sampel dalam penelitian ini adalah 27,44317 sedangkan nilai maksimum dari *LnSize* adalah 33,39648.

4. 2. 2. Pengujian Asumsi Klasik

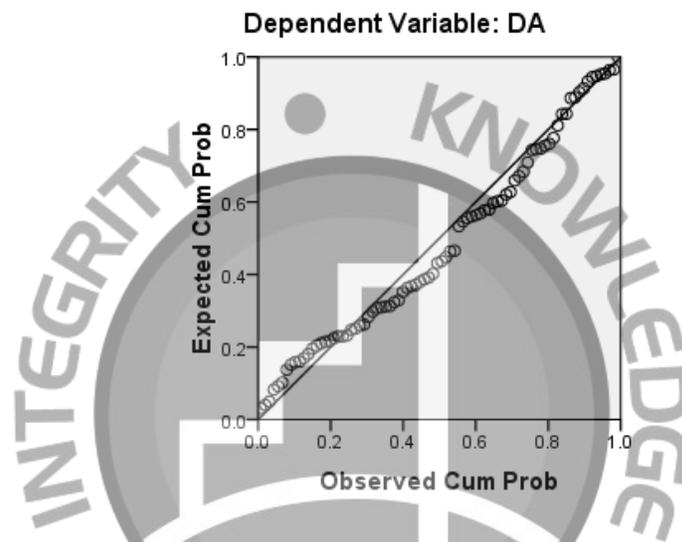
4. 2. 2. 1. Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel terikat dan variabel bebas keduanya mempunyai distribusi normal ataukah tidak. Metode yang digunakan untuk melakukan uji normalitas ini adalah dengan melihat *normal probability plot* yang membandingkan distribusi kumulatif dari data sesungguhnya dengan distribusi kumulatif dari distribusi normal. Distribusi normal akan membentuk satu garis lurus diagonal, dan plotting data

akan dibandingkan dengan garis diagonal (Imam Ghozali, 2001). Berikut ini adalah hasil uji normalitas dengan menggunakan program SPSS 16:

Gambar 4.1

Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual



Sumber: Data penelitian yang diolah

Dari gambar di atas, dapat dilihat bahwa data menyebar di sekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa model regresi pada penelitian ini memenuhi asumsi normalitas.

4. 2. 2. 2. Uji Multikolinieritas

Uji multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (*independent variables*). Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi di antara variabel bebas. Multikolinieritas dapat dilihat dari nilai *tolerance* dan *Variance Inflation Factor*

(*VIF*). Batas nilai *tolerance* yang umum digunakan adalah 0.10 sedangkan nilai *VIF* adalah 10. Jika nilai *tolerance* lebih besar dari 0,10 dan nilai *VIF* lebih kecil dari 10 maka antar variabel bebas tidak terjadi multikolinieritas.

Berikut ini adalah hasil dari uji multikolinieritas:

Tabel 4.5

Hasil Uji Multikolinieritas

	Tolerance	VIF	Keterangan
KDKI	0.928	1.078	Tidak ada multikolinieritas
UDK	0.683	1.464	Tidak ada multikolinieritas
UKA	0.586	1.705	Tidak ada multikolinieritas
KI	0.632	1.582	Tidak ada multikolinieritas
<i>LnSize</i>	0.573	1.786	Tidak ada multikolinieritas

Sumber: Data penelitian yang diolah

Dari tabel di atas, dapat dilihat bahwa nilai *tolerance* dari variabel KDKI sebesar 0.928, UDK sebesar 0.683, UKA 0.586, KI sebesar 0.632, dan *LnSize* sebesar 0.573. Sedangkan nilai *VIF* dari variabel KDKI sebesar 1.078, UDK sebesar 1.464, UKA sebesar 0.586, KI sebesar 1.582, dan *LnSize* sebesar 1.786. Oleh karena nilai *tolerance* yang diperoleh lebih besar dari 0.10 dan nilai *VIF* kurang dari 10, maka dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi masalah multikolinieritas pada model penelitian ini.

4. 2. 2. 3. Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi bertujuan menguji apakah dalam suatu model regresi linear ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pada periode $t-1$ (sebelumnya). Berdasarkan pengolahan data, nilai Durbin-Watson yang diperoleh adalah 1,415 yang dapat dilihat pada tabel 4.6 sebagai berikut:

Tabel 4.6
Hasil Uji Autokorelasi

Model	dl dan du	4-du dan 4-dl	Durbin-Watson
1	1,52 dan 1,77	2,23 dan 2,48	1,415

Sumber: Data penelitian yang diolah

Kesimpulan apakah model pada penelitian ini terdapat autokorelasi atau tidak adalah dengan melihat tabel Durbin-Watson *test decision rules* sebagai berikut:

Tabel 4.7
Durbin-Watson Test Decision Rules

Durbin-Watson	Kesimpulan
$0 < d < 1,52$	Ada Autokorelasi positif
$1,52 \leq d \leq 1,77$	Tidak dapat disimpulkan
$2,48 < d < 4$	Ada Autokorelasi negatif
$2,23 \leq d \leq 2,48$	Tidak dapat disimpulkan
$1,77 < d < 2,23$	Tidak ada Autokorelasi

Sumber: data penelitian yang diolah

Berdasarkan tabel 4.6 dan 4.7, bahwa dapat dilihat bahwa nilai Durbin-Watson dari model penelitian ini adalah 1,415 dan nilai ini menghasilkan kesimpulan bahwa dalam model penelitian ini terdapat autokorelasi positif. Data dalam penelitian ini termasuk data panel yang diperoleh dengan menggunakan metode *pooled data*, namun dalam pengolahannya menjadi *cross sectional*. Apabila terdapat autokorelasi positif dalam penelitian ini, hal tersebut tidak akan menjadi masalah. Dengan kata lain, model penelitian ini telah memenuhi salah satu asumsi klasik yaitu bebas autokorelasi.

4. 2. 2. 4. Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan *variance* dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika *variance* dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain tetap, maka disebut Homokedastisitas dan jika berbeda disebut heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah yang homokedastisitas atau tidak terjadi heteroskedastisitas. Dalam penelitian ini, metode yang digunakan untuk menguji heterokedastisitas adalah uji Glejser. Dari pengolahan data, maka diperoleh output pada tabel 4.8 sebagai berikut:

Tabel 4.8
Hasil Uji Heteroskedastisitas

	Sig.	Ketentuan	Keterangan
KDKI	0.636	$p > 0.05$	tidak ada heteroskedastisitas
UDK	0.985	$p > 0.05$	tidak ada heteroskedastisitas
UKA	0.709	$p > 0.05$	tidak ada heteroskedastisitas
KI	0.120	$p > 0.05$	tidak ada heteroskedastisitas
LnSize	0.467	$p > 0.05$	tidak ada heteroskedastisitas

Sumber: data penelitian yang diolah

Berdasarkan tabel 4.8, dapat dilihat bahwa nilai signifikansi kelima variabel lebih besar dari 0.05. Berdasarkan ketentuan yang ada, jika nilai signifikansi lebih besar dari 0.05 maka dapat disimpulkan model regresi tidak terdapat heteroskedastisitas. Hal ini menunjukkan *variance* dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain tetap. Dengan demikian, penelitian ini telah bebas dari heteroskedastisitas sehingga telah memenuhi salah satu asumsi klasik.

4. 2. 3. Uji Signifikansi Parameter Individual

Uji signifikansi parameter individual atau uji *statistic t* pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel independen secara individual dalam menerangkan variasi variabel independen. Berikut ini merupakan tabel 4.9 yang merupakan hasil pengolahan uji *statistic t* dengan program SPSS:

Tabel 4.9
Hasil Uji Statistik t

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	-3.167	2.253		-1.405	.164
KDKI	-.213	.823	-.028	-.259	.796
UDK	.038	.053	.090	.719	.474
UKA	.314	.109	.388	2.879	.005
KI	-1.219	.593	-.266	-2.054	.043
LnSIZE	.82	.084	.134	.981	.330

a. Dependent Variable: DA

Sumber: Data penelitian yang diolah

Dari tabel di atas, maka persamaan regresi yang terbentuk dalam penelitian ini adalah:

$$Y = -3,167 - 0,213X1 + 0,38X2 + 0,314X3 - 1,219X4 + 0,82 X5 + e$$

atau

$$DA = -3,167 - 0,213KDKI + 0,38UDK + 0,314UKA - 1,219KI + 0,82 LnSize + e$$

Dengan demikian, hasil tersebut dapat diinterpretasikan sebagai berikut:

1. Konstanta -3,167, artinya tanpa variabel komposisi dewan komisaris independen, ukuran dewan komisaris, keberadaan komite audit, kepemilikan institusional, serta ukuran perusahaan maka terjadi manajemen laba sebesar -3,167 pada suatu bank.

2. Nilai koefisien komposisi dewan komisaris independen sebesar $-0,213$ menunjukkan apabila terjadi kenaikan satu satuan komposisi dewan komisaris independen pada periode t dan variabel lain dianggap tetap maka akan mengakibatkan manajemen laba pada periode t berkurang sebesar $0,213$.
3. Nilai koefisien ukuran dewan komisaris sebesar $0,38$ menunjukkan apabila terjadi kenaikan jumlah dewan komisaris pada periode t sebesar satu satuan dan variabel lain dianggap tetap maka akan mengakibatkan manajemen laba pada periode t bertambah sebesar $0,38$.
4. Nilai koefisien ukuran komite audit sebesar $0,314$ menunjukkan apabila terjadi kenaikan jumlah anggota komite audit pada periode t sebesar satu satuan dan variabel lain dianggap tetap maka akan mengakibatkan manajemen laba pada periode t bertambah sebesar $0,314$.
5. Nilai koefisien kepemilikan institusional sebesar $-1,219$ menunjukkan apabila terjadi kenaikan kepemilikan institusional pada periode t sebesar satu satuan dan variabel lain dianggap tetap maka akan mengakibatkan manajemen laba pada periode t berkurang sebesar $1,219$.
6. Nilai koefisien $LnSize$ sebesar $0,82$ menunjukkan apabila terjadi kenaikan $LnSize$ bank pada periode t sebesar satu satuan dan variabel lain dianggap tetap maka akan mengakibatkan manajemen laba bertambah sebesar $0,82$.

4. 2. 3. 1. Komposisi Dewan Komisaris Independen terhadap Manajemen

Laba

Ho1 : Komposisi Dewan Komisaris Independen tidak berpengaruh secara signifikan terhadap manajemen laba.

Ha1 : Komposisi Dewan Komisaris Independen berpengaruh secara signifikan terhadap manajemen laba.

Dari tabel 4.9 dapat dilihat bahwa nilai signifikansi variabel komposisi dewan komisaris independen lebih dari 0,05 yaitu sebesar 0,796. Jika signifikansi lebih besar dari 0,05, maka H_0 tidak dapat ditolak dan H_a ditolak. Oleh karena itu, dalam penelitian ini H_0 tidak dapat ditolak yang berarti komposisi dewan komisaris independen tidak berpengaruh secara signifikan terhadap manajemen laba.

Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa pada industri perbankan komposisi dewan komisaris independen tidak memiliki pengaruh secara signifikan terhadap manajemen laba. Hal ini menunjukkan bahwa peran dewan komisaris independen dalam melakukan fungsi monitoring terhadap operasional perusahaan oleh pihak manajemen kurang efektif. Selain itu, kontribusi dari dewan komisaris independen terhadap hasil dari proses penyusunan laporan keuangan juga dapat dikatakan kurang efektif. Hal ini dapat terjadi karena latar belakang dari dewan komisaris independen adalah pihak yang bukan dari kalangan perbankan, tidak mengerti tentang akuntansi atau laporan keuangan sehingga mereka tidak dapat melakukan fungsi monitoring secara baik

sehingga mereka tidak memiliki pengaruh secara signifikan terhadap manajemen laba yang dilakukan oleh manajemen bank.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian-penelitian yang dilakukan oleh Veronica dan Bachtiar (2004), Veronica dan Utama (2005), Boediono (2005) serta Veronica dan Siddharta (2006) yang menghasilkan kesimpulan bahwa secara parsial komposisi dewan komisaris independen tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap tindakan manajemen laba yang dilakukan oleh pihak manajemen.

Sebaliknya, hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian-penelitian yang dilakukan oleh Fama dan Jensen (1983), Beasley (1996), Dechow, Patricia, Sloan dan Sweeney (1996), Klein (2002), Peasnell, Pope dan Young (2001), Chtourou *et al.* (2001), Pratana dan Mas'ud (2003), Xie, Biao, Wallace dan Peter (2003), Cornett *et al.*, (2006), Marihot dan Doddy (2007), serta Muh. Arief dan Bambang Agus (2007). Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan hasil penelitian mereka yang menghasilkan kesimpulan bahwa komposisi dewan komisaris independen mempengaruhi tindakan manajemen laba yang dilakukan oleh pihak manajemen.

4. 2. 3. 2. Ukuran Dewan Komisaris terhadap Manajemen Laba

Ho2 : Ukuran Dewan Komisaris tidak berpengaruh secara signifikan terhadap manajemen laba.

Ha2 : Ukuran Dewan Komisaris berpengaruh secara signifikan terhadap manajemen laba.

Dari tabel 4.9 dapat dilihat bahwa nilai signifikansi variabel ukuran dewan komisaris lebih dari 0,05 yaitu sebesar 0,474. Jika signifikansi lebih besar dari 0,05, maka H_0 tidak dapat ditolak dan H_a ditolak. Oleh karena itu, dalam penelitian ini H_0 tidak dapat ditolak yang berarti ukuran dewan komisaris tidak berpengaruh secara signifikan terhadap manajemen laba.

Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa pada industri perbankan ukuran dewan komisaris tidak memiliki pengaruh secara signifikan terhadap manajemen laba. Hal ini menunjukkan bahwa berapa pun anggota dewan komisaris yang terdapat dalam suatu bank, mereka tidak dapat mempengaruhi tindakan manajemen laba yang dilakukan oleh pihak manajemen bank. Selain itu, dapat dikatakan pula bahwa peran dewan komisaris bank dalam melaksanakan fungsi monitoring terhadap operasional yang dilakukan oleh pihak manajemen bank kurang efektif. Selain itu, kontribusi dari dewan komisaris terhadap hasil dari proses penyusunan laporan keuangan juga dapat dikatakan kurang efektif. Hal ini dapat terjadi karena adanya koordinasi yang kurang efektif antara pihak manajemen dengan dewan komisaris. Koordinasi ini dapat dilihat dari jumlah kehadiran atau persentase kehadiran rapat yang dilakukan antara pihak manajemen dengan dewan komisaris bank. Jika persentase kehadiran anggota dewan komisaris kecil, maka koordinasi antara pihak manajemen dan dewan komisaris kurang efektif sehingga dapat mengakibatkan tindakan *opportunistic* manajemen untuk melakukan manajemen laba karena fungsi pengawasan yang kurang dari dewan komisaris. Selain itu, latar belakang dari anggota dewan komisaris juga dapat mempengaruhi tindakan manajemen laba. Jika dewan

komisaris tidak memiliki keahlian di bidang perbankan atau akuntansi, maka mereka tidak dapat mempengaruhi tindakan manajemen laba yang dilakukan oleh pihak manajemen. Hal-hal tersebut dapat mengakibatkan ukuran dewan komisaris tidak berpengaruh secara signifikan terhadap tindakan manajemen laba.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian-penelitian yang dilakukan oleh Zhou dan Chen (2004) yang juga meneliti pengaruh ukuran dewan komisaris terhadap manajemen laba yang diukur dengan menggunakan *loan loss provisions* serta Muh. Arief dan Bambang Agus (2007). Hasil penelitian mereka menyimpulkan bahwa ukuran dewan komisaris tidak mempengaruhi tindakan manajemen laba.

Sebaliknya, hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian-penelitian yang dilakukan oleh Yermarck (1996), Beasley (1996), Jensen (1993), Chtourou, Bedrad dan Courteau (2001), Yu (2006), Xie, Davidson, dan Dadalt (2003), Midiastuty dan Machfoedz (2007), serta Marihot dan Doddy (2007). Hasil penelitian mereka menyimpulkan bahwa ukuran dewan komisaris berpengaruh terhadap manajemen laba.

4. 2. 3. 3. Ukuran Komite Audit terhadap Manajemen Laba

Ho3 : Ukuran Komite Audit tidak berpengaruh secara signifikan terhadap manajemen laba.

Ha3 : Ukuran Komite Audit berpengaruh secara signifikan terhadap manajemen laba.

Dari tabel 4.9 dapat dilihat bahwa nilai signifikansi variabel ukuran komite audit kurang dari 0,05 yaitu sebesar 0,005 dengan *unstandardized coefficients beta* sebesar 0,314. Jika signifikansi lebih kecil dari 0,05, maka H_0 ditolak dan H_a diterima. Oleh karena itu, dalam penelitian ini H_0 ditolak yang berarti ukuran komite audit berpengaruh secara signifikan terhadap manajemen laba dengan arah positif. Interpretasi dari hasil persamaan regresinya yaitu setiap penambahan satu anggota komite audit maka akan terjadi peningkatan manajemen laba sebesar 0,314. Hal ini menunjukkan bahwa semakin besar komite audit maka manajemen laba semakin besar.

Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa ukuran komite audit memiliki pengaruh secara signifikan terhadap tindakan manajemen laba yakni semakin banyak anggota komite audit maka manajemen laba semakin besar. Hal ini dapat terjadi karena pada industri perbankan terdapat regulasi-regulasi yang sangat ketat. Regulasi ini mengatur bank untuk menaati ketentuan-ketentuan dari otoritas moneter yaitu Bank Indonesia karena jika keadaan moneter buruk maka akan berdampak pada keadaan ekonomi secara luas. Oleh karena itu, peran komite audit dalam hal ini adalah memastikan bahwa dalam kegiatan operasional sehari-hari, bank melaksanakan kegiatan operasional sesuai dengan peraturan-peraturan yang ada serta tidak melanggar peraturan-peraturan yang dibuat oleh Bank Indonesia. Jika bank melanggar peraturan yang ditetapkan, maka akan dikenakan sanksi. Sebagai contoh, dalam pembentukan PPAP terdapat persentase yang harus dipenuhi bank berdasarkan tingkat kolektibilitas dari aktiva produktifnya. Peran komite audit dalam hal ini adalah memastikan bahwa bank telah memenuhi

peraturan pembentukan PPAP yakni jumlah PPAP yang dibentuk bank tidak boleh kurang dari PPAP yang wajib dibentuk. Dari hasil penelitian, terlihat bahwa PPAP yang dibentuk bank lebih besar dibandingkan dengan PPAP yang wajib dibentuk berdasarkan ketentuan dari BI. Hal ini menandakan bahwa komite audit sangat berhati-hati dan telah menjalankan tugasnya secara efektif dalam menaati peraturan BI. Bagi mereka lebih baik membentuk PPAP yang lebih besar daripada PPAP yang wajib dibentuk sebab jika kurang maka bank akan terkena sanksi dari BI. Dari contoh tersebut, dapat dilihat bahwa bank melakukan manajemen laba dengan pola *income minimization* (penurunan laba) dengan cara menaikkan beban PPAP sehingga laba yang diperoleh menurun. Hal ini sesuai dengan hasil penelitian pada statistik deskriptif yang menyatakan bahwa 59,52% sampel melakukan *income minimization*. Oleh karena itu, penelitian ini menyimpulkan bahwa semakin besar jumlah anggota komite audit, maka manajemen laba (*income minimization*) akan semakin besar. Dengan kata lain, ukuran komite audit secara signifikan mempengaruhi manajemen laba.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian-penelitian yang dilakukan oleh Wedari (2004) yang juga menyimpulkan bahwa keberadaan komite audit memiliki pengaruh terhadap manajemen laba dengan arah positif. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Xie, Davidson dan Dadalt (2003), Carcello *et al.* (2006), Veronica dan Bachtiar (2004), Wilopo (2004), serta Marihot dan Doddy (2007) menyimpulkan bahwa komite audit memiliki pengaruh terhadap manajemen laba namun dengan arah negatif. Sebaliknya, penelitian yang dilakukan oleh Veronica

dan Utama (2005), serta Veronica dan Siddharta (2006) menyimpulkan bahwa tidak ada pengaruh antara keberadaan komite audit dengan manajemen laba.

4. 2. 3. 4. Kepemilikan Institusional terhadap Manajemen Laba

Ho4 : Kepemilikan institusional tidak berpengaruh secara signifikan terhadap manajemen laba.

Ha4 : Kepemilikan institusional berpengaruh secara signifikan terhadap manajemen laba.

Dari tabel 4.9 dapat dilihat bahwa nilai signifikansi variabel keberadaan komite audit kurang dari 0,05 yaitu sebesar 0,043 dengan *unstandardized coefficients beta* sebesar -1,219. Jika signifikansi lebih kecil dari 0,05, maka H_0 ditolak dan H_a diterima. Oleh karena itu, dalam penelitian ini H_0 ditolak yang berarti kepemilikan institusional berpengaruh secara signifikan terhadap manajemen laba dengan arah negatif. Interpretasi dari hasil persamaan regresinya yaitu setiap penambahan satu satuan kepemilikan institusional maka akan terjadi penurunan manajemen laba sebesar 1,219. Hal ini menunjukkan bahwa semakin besar kepemilikan institusional maka manajemen laba semakin kecil.

Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa kepemilikan saham oleh investor institusional secara signifikan mempengaruhi tindakan manajemen laba dengan arah negatif. Dengan kata lain, semakin besar kepemilikan institusional maka semakin kecil manajemen laba. Dari hasil penelitian ini, terbukti bahwa kepemilikan saham oleh investor institusional memiliki kemampuan untuk mengendalikan pihak manajemen melalui proses monitoring

secara efektif sehingga mengurangi tindakan manajemen laba. Hal ini dapat terjadi karena manajer mengakui bahwa investor institusional lebih banyak memiliki informasi dibandingkan dengan investor individual sehingga motivasi manajer untuk melakukan manajemen laba menjadi berkurang sebab manajer sadar bahwa investor institusional tidak mudah untuk “dibodohi”. Selain itu, investor institusional akan melakukan fungsi monitoringnya secara lebih efektif dan tidak akan mudah diperdaya atau percaya dengan tindakan manipulasi oleh manajer seperti tindakan manajemen laba. Oleh karena itu, penelitian ini menyimpulkan bahwa semakin besar kepemilikan institusional, maka manajemen laba akan semakin kecil. Dengan kata lain, kepemilikan institusional secara signifikan mempengaruhi manajemen laba.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian-penelitian yang dilakukan oleh Bushee (1998), Rajgopal, Venkatachalam dan Jiambalvo (1999), McConnell dan Servaes (1990), Nesbitt (1994), Smith (1996), Del Guercio dan Hawkins (1999), dan Hartzell dan Starks (2003), Cornett *et al.* (2006), Midiastuty dan Machfoedz (2003) serta Fidyati (2004) yang juga menyimpulkan bahwa kepemilikan institusional memiliki pengaruh terhadap manajemen laba dengan arah yang negatif pula. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Wedari (2004) dan Gideon (2005) menyimpulkan bahwa kepemilikan institusional memiliki pengaruh terhadap manajemen laba namun dengan arah yang positif.

Sebaliknya, hasil penelitian yang dilakukan oleh Darmawati (2003), Veronica dan Bachtiar (2004), Veronica dan Siddharta (2006), Syaiful dan Nurul (2007), serta Muh. Arief dan Bambang Agus (2007) menyimpulkan bahwa

kepemilikan institusional tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap manajemen laba.

4. 2. 3. 5. Ukuran Perusahaan terhadap Manajemen Laba

Ho5 : Ukuran perusahaan tidak berpengaruh secara signifikan terhadap manajemen laba.

Ha5 : Ukuran perusahaan berpengaruh secara signifikan terhadap manajemen laba.

Dari tabel 4.9 dapat dilihat bahwa nilai signifikansi variabel ukuran perusahaan lebih dari 0,05 yaitu sebesar 0,330. Jika signifikansi lebih besar dari 0,05, maka H_0 tidak dapat ditolak dan H_a ditolak. Oleh karena itu, dalam penelitian ini H_0 tidak dapat ditolak yang berarti ukuran perusahaan tidak berpengaruh secara signifikan terhadap manajemen laba.

Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa pada industri perbankan ukuran perusahaan tidak memiliki pengaruh secara signifikan terhadap manajemen laba. Hal ini terjadi karena baik bank yang berukuran besar maupun kecil tetap melakukan manajemen laba. Dengan demikian, ukuran perusahaan tidak memiliki secara signifikan pengaruh terhadap manajemen laba.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Marihot dan Doddy (2007) yang juga menyimpulkan bahwa ukuran perusahaan tidak memiliki pengaruh terhadap manajemen laba pada perusahaan perbankan di Indonesia. Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian-penelitian yang dilakukan oleh Peasnell, Pope dan Young (1998), Chtourou, Bedard, dan Couteau

(2001), Lee dan Choi (2002), Midiastuty dan Machfoedz (2003), Rahmawati dan Baridwan (2006), Veronica dan Utama (20005), Veronica dan Siddharta (2006) yang menyimpulkan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh secara signifikan terhadap manajemen laba meskipun sampel dan proksi ukuran perusahaan yang mereka gunakan berbeda.

4. 2. 4. Uji Signifikansi Simultan

Uji signifikansi simultan atau uji *statistic F* pada dasarnya menunjukkan apakah semua variabel bebas dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel terikat/dependen. Hipotesis yang hendak diuji yaitu:

Ho5 : Komposisi dewan komisaris independen, ukuran dewan komisaris, ukuran komite audit, kepemilikan institusional, dan ukuran perusahaan secara bersamaan tidak mempengaruhi manajemen laba secara signifikan.

Ha5 : Komposisi dewan komisaris independen, ukuran dewan komisaris, ukuran komite audit, kepemilikan institusional, dan ukuran perusahaan secara bersamaan mempengaruhi manajemen laba secara signifikan.

Berikut ini merupakan tabel 4.10 yang merupakan hasil pengolahan uji *statistic F* dengan program SPSS:

Tabel 4.10
Hasil Uji Statistik F

ANOVA^b

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	13.498	5	2.700	3.215	.011 ^a
	Residual	65.502	78	.840		
	Total	79.000	83			

a. Predictors: (Constant), KDKI, UDK, KKA, KI, LnSize

b. Dependent Variable: DA

Sumber: Data penelitian yang diolah

Dari tabel 4.10 dapat dilihat bahwa nilai signifikansi kurang dari 0,05 yaitu sebesar 0,011. Jika signifikansi lebih kecil dari 0,05, maka H_0 ditolak dan H_a diterima. Oleh karena itu, dalam penelitian ini H_0 ditolak yang berarti komposisi dewan komisaris independen, ukuran dewan komisaris, ukuran komite audit, kepemilikan institusional, dan ukuran perusahaan secara bersamaan mempengaruhi manajemen laba secara signifikan.

4. 2. 5. Koefisien Determinasi

Koefisien determinasi pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Berikut ini merupakan tabel 4.11 yang merupakan hasil pengolahan koefisien determinasi dengan program SPSS:

Tabel 4.11
Hasil Koefisien Determinasi

Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.413 ^a	.171	.118	.91638625

a. Predictors: (Constant), KDKI, UDK, KKA, KI, LnSize

Sumber: Data penelitian yang diolah

Dari tabel 4.11, nilai koefisien determinasi (*R square*) adalah sebesar 0,171. *R square* mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Dalam penelitian ini, koefisien determinasi yang digunakan adalah *adjusted R square*. Apabila koefisien determinasi yang digunakan adalah *R square*, ketika model ditambahkan satu variabel independen, maka *R square* akan bertambah walaupun nilai variabel tersebut tidak signifikan. Apabila menggunakan *adjusted R square*, maka ketika satu variabel independen ditambahkan ke dalam model, nilai *adjusted R square* dapat naik atau turun (Imam Ghozali, 2001).

Dari tabel 4.11, nilai *adjusted R square* adalah sebesar 0,118. Nilai koefisien determinasi sebesar 0,118 ini dapat diinterpretasikan sebagai model regresi berganda mampu menjelaskan pengaruh komposisi dewan komisaris independen, ukuran dewan komisaris, ukuran komite audit, kepemilikan institusional, serta ukuran perusahaan terhadap manajemen laba sebesar 11,8% sedangkan 88,2% sisanya dijelaskan oleh variabel lain yang tidak diteliti.

4. 3. Analisis Sensitivitas

Untuk menguji sensitivitas dari hasil pengujian hipotesis utama, maka akan dilakukan uji sensitivitas dimana pengelolaan laba atau manajemen laba menggunakan model Beaver dengan pendekatan *loan loss provision* atau penyisihan penghapusan aktiva produktif (PPAP). Dari hasil analisis regresi maka diperoleh tabel sebagai berikut:

Tabel 4.12

Koefisien Determinasi Model Beaver

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.493 ^a	.243	.205	.0744761	1.170

a. Predictors: (Constant), NPA1, LOAN, NPA, CO

b. Dependent Variable: PPAPkredit

Sumber: Data penelitian yang diolah

Tabel 4.13

Uji Statistik F Model Beaver

ANOVA^b

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	.141	4	.035	6.349	.000 ^a
	Residual	.438	79	.006		
	Total	.579	83			

a. Predictors: (Constant), NPA1, LOAN, NPA, CO

b. Dependent Variable: PPAPkredit

Sumber: Data penelitian yang diolah

Dari tabel 4.12 dapat dilihat bahwa model Beaver memiliki koefisien determinasi (*adjusted R square*) sebesar 0,205. Nilai koefisien determinasi sebesar 0,205 ini dapat diinterpretasikan sebagai model regresi berganda mampu menjelaskan pengaruh *loan charge off* (pinjaman yang dihapusbukukan), *loan* (kredit yang diberikan), *non performing asset* (aktiva produktif bermasalah), dan perubahan *non performing asset* terhadap penyisihan penghapusan aktiva produktif sebesar 20,5% dan 79,5% sisanya dijelaskan oleh variabel lain yang tidak diteliti. Dari tabel 4.13 dapat dilihat bahwa nilai signifikansi kurang dari 0,05 yaitu sebesar 0.000. Hal ini menunjukkan *loan charge off* (pinjaman yang dihapusbukukan), *loan* (kredit yang diberikan), *non performing asset* (aktiva produktif bermasalah), dan perubahan *non performing asset* secara bersamaan mempengaruhi penyisihan penghapusan aktiva produktif.

Dari tabel 4.12 dapat dilihat bahwa nilai koefisien determinasi dari model Beaver apabila diaplikasikan pada industri perbankan di Indonesia sebesar 20,5%. Angka ini cukup tinggi mengingat model Beaver tersebut pertama kali digunakan pada tahun 1996 dengan sampel industri perbankan di Amerika Serikat. Seiring berjalannya waktu, hingga saat ini pastilah terjadi perubahan-perubahan terkait dengan industri perbankan misalnya dalam hal pembentukan PPAP sehingga perlu dikembangkan lagi model-model yang dapat digunakan dalam mendeteksi adanya tindakan manajemen laba pada industri perbankan terutama yang sesuai dengan keadaan industri perbankan di Indonesia. Oleh karena itu, dalam penelitian ini penulis mencoba merumuskan suatu model yang dapat digunakan untuk mendeteksi laba yakni metode selisih PPAP dengan selisih laba audit.

4.3.1. Metode Selisih PPAP

Metode ini memiliki dasar pemikiran yang hampir sama dengan model Beaver dimana indikator dari adanya tindakan manajemen laba terdapat pada nilai PPAP yang dibentuk oleh bank. Dalam industri perbankan di Indonesia, Bank Indonesia telah membuat ketentuan-ketentuan tentang PPAP yang harus dibentuk oleh bank. Dalam kenyataannya, bank-bank di Indonesia ada yang membentuk PPAP di atas PPAP yang wajib dibentuk berdasarkan ketentuan BI dan ada pula yang membentuk PPAP di bawah PPAP yang wajib dibentuk berdasarkan ketentuan BI. Oleh karena itu, pada metode ini selisih antara PPAP yang dibentuk bank dengan PPAP yang wajib dibentuk bank merupakan proksi dari adanya tindakan manajemen laba yang dilakukan oleh bank.

Jika PPAP yang dibentuk bank lebih besar daripada PPAP yang wajib dibentuk bank, maka dapat dikatakan bahwa bank tersebut melakukan manajemen laba dengan pola *income minimization* atau penurunan laba. Hal ini dikarenakan jika bank membentuk PPAP di atas PPAP yang wajib dibentuk maka bank mengakui beban PPAP yang lebih besar sehingga dapat membuat nilai laba menurun. Jika PPAP yang dibentuk bank lebih kecil daripada PPAP yang wajib dibentuk bank, maka dapat dikatakan bahwa bank tersebut melakukan manajemen laba dengan pola *income maximization* atau kenaikan laba. Hal ini dikarenakan jika bank membentuk PPAP di bawah PPAP yang wajib dibentuk maka bank mengakui beban PPAP yang lebih kecil sehingga dapat menaikkan nilai laba. Secara ringkas model tersebut dituliskan sebagai berikut:

$$\text{Model selisih PPAP} = \frac{\text{PPAP}_{\text{WD}} - \text{PPAP}}{\text{PPAP}}$$

PPAP_{WD} : PPAP yang wajib dibentuk bank berdasarkan ketentuan BI

PPAP : PPAP yang telah dibentuk bank

Nilai model selisih PPAP negatif menandakan bank melakukan *income minimization* (penurunan laba) dan sebaliknya.

Jika dibandingkan dengan model Beaver, model ini mampu menghasilkan 50% hasil yang sama dengan hasil jika menggunakan model Beaver. Dalam hal ini, hasil yang sama menunjukkan bahwa bank tersebut melakukan tindakan manajemen laba dalam pola *income minimization* maupun *income maximization* bukan dalam hal nilai nominalnya (data terlampir).

Setelah melakukan perhitungan dengan menggunakan metode selisih PPAP ini, maka penulis mencoba melakukan analisis regresi antara nilai selisih PPAP sebagai proksi manajemen laba dengan variabel-variabel independen dalam penelitian ini. Hasil analisis regresi adalah sebagai berikut:

Tabel 4.14**Koefisien Determinasi Model Selisih PPAP****Model Summary^b**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.358 ^a	.128	.072	.17812525

a. Predictors: (Constant), LnSIZE, KDKI, KI, UDK, UKA

b. Dependent Variable: Selisih PPAP

Sumber: Data penelitian yang diolah

Dari tabel 4.14 dapat dilihat bahwa model selisih PPAP memiliki koefisien determinasi (*adjusted R square*) sebesar 0,702. Nilai koefisien determinasi sebesar 0,702 ini dapat diinterpretasikan sebagai model regresi berganda mampu menjelaskan pengaruh komposisi dewan komisaris independen, ukuran dewan komisaris, ukuran komite audit, kepemilikan istitusional, serta ukuran perusahaan terhadap manajemen laba sebesar 7,2% dan 92,8% sisanya dijelaskan oleh variabel lain yang tidak diteliti.

Tabel 4.15**Uji Statistik F Model Selisih PPAP****ANOVA^b**

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	.363	5	.073	2.291	.054 ^a
	Residual	2.475	78	.032		
	Total	2.838	83			

a. Predictors: (Constant), LnSIZE, KDKI, KI, UDK,UKA

b. Dependent Variable: Selisih PPAP

Sumber: Data penelitian yang diolah

Dari tabel 4.15 dapat dilihat bahwa nilai signifikansi sebesar 0,054. Hal ini berarti pada tingkat signifikansi atau $\alpha=0,10$ komposisi dewan komisaris independen, ukuran dewan komisaris, ukuran komite audit, kepemilikan institusional, serta ukuran perusahaan secara bersamaan mempengaruhi manajemen laba secara signifikan.

Tabel 4.16

Uji Statistik t Model Selisih PPAP

Model		Coefficients ^a			t	Sig.
		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	-.912	.438		-2.083	.041
	KDKI	-.287	.160	-.197	-1.793	.077
	UDK	-.007	.010	-.087	-.683	.497
	UKA	-.051	.021	-.333	-2.410	.018
	KI	.197	.115	.227	1.708	.092
	LnSIZE	.033	.016	.283	2.027	.046

a. Dependent Variable: Selisih PPAP

Sumber: Data penelitian yang diolah

Dari tabel 4.16 terlihat beberapa perbedaan dari hasil uji parameter individual antara model Beaver dengan model selisih PPAP. Dalam model ini variabel komposisi dewan komisaris independen pada tingkat signifikansi atau $\alpha = 0,10$ ($0.077 < 0.10$) memiliki pengaruh yang negatif antara komposisi dewan komisaris independen dengan manajemen laba yang berarti semakin besar komposisi dewan komisaris independen maka manajemen laba semakin kecil.

Pada model Beaver variabel komposisi dewan komisaris independen tidak memiliki pengaruh secara signifikan terhadap manajemen laba. Sama dengan hasil pada model Beaver, variabel ukuran dewan komisaris tidak memiliki pengaruh secara signifikan terhadap manajemen laba. Variabel ukuran komite audit memiliki nilai signifikansi sebesar 0,018 ($\alpha < 0,05$) sehingga dapat dikatakan bahwa ukuran komite audit memiliki pengaruh secara signifikan terhadap manajemen laba dengan arah yang negatif yang berarti semakin besar komite audit maka manajemen laba semakin kecil. Hasil ini berbeda dengan menggunakan model Beaver yang menyimpulkan ukuran komite audit memiliki pengaruh secara signifikan terhadap manajemen laba dengan arah positif. Variabel kepemilikan institusional memiliki nilai signifikansi 0,092 yang berarti pada tingkat signifikansi 0,10 variabel kepemilikan institusional memiliki pengaruh secara signifikan terhadap manajemen laba dengan arah positif. Hal ini menunjukkan bahwa semakin besar kepemilikan institusional maka manajemen laba semakin besar. Hasil ini berbeda jika menggunakan model Beaver yang menyimpulkan bahwa kepemilikan institusional memiliki pengaruh secara signifikan terhadap manajemen laba dengan arah negatif. Variabel ukuran perusahaan memiliki nilai signifikansi sebesar 0,046 ($\alpha < 0,05$) sehingga dapat dikatakan bahwa ukuran perusahaan memiliki pengaruh secara signifikan terhadap manajemen laba dengan arah yang positif yang berarti semakin besar perusahaan maka manajemen laba juga semakin besar. Hal ini juga berbeda dengan menggunakan model Beaver yang menyimpulkan bahwa ukuran perusahaan tidak memiliki pengaruh secara signifikan terhadap manajemen laba.

4.3.2. Metode Selisih Laba Audit

Berbeda dengan model-model sebelumnya, model ini membandingkan antara laba suatu bank yang telah diaudit dengan laba suatu bank sebelum diaudit. Laba bank sebelum diaudit ini diperoleh dari laporan keuangan yang disusun oleh bank yang setiap tahunnya harus diserahkan kepada Bank Indonesia, sedangkan laba bank yang telah diaudit diperoleh dari laporan keuangan yang telah diaudit yang dipublikasikan. Dasar pemikiran dari metode ini adalah jika terdapat perbedaan antara laba *audited* dengan laba yang belum diaudit maka bank tersebut melakukan tindakan manajemen laba. Hal ini dikarenakan jika laporan keuangan telah diaudit maka diasumsikan laba yang terbentuk merupakan laba yang telah sesuai dengan standar akuntansi yang ada, sedangkan laba yang belum diaudit adalah laba yang memang dibuat oleh bank untuk tujuan-tujuan tertentu.

Jika laba *audited* lebih besar daripada laba sebelum diaudit maka dapat dikatakan bahwa bank tersebut melakukan manajemen laba dengan pola *income minimization* atau penurunan laba. Hal ini dikarenakan bank sebenarnya dapat melaporkan laba yang lebih besar yang telah sesuai dengan standar akuntansi yang ada, namun dalam hal ini bank melaporkan laba sebelum audit yang lebih kecil sehingga dapat dikatakan bahwa bank melakukan penurunan laba. Jika laba *audited* lebih kecil daripada laba sebelum diaudit maka dapat dikatakan bahwa bank tersebut melakukan manajemen laba dengan pola *income maximization* atau kenaikan laba. Hal ini dikarenakan bank melaporkan laba sebelum diaudit yang

lebih besar dibandingkan laba *audited* yang ternyata lebih kecil dimana laba *audited* itu telah sesuai dengan standar akuntansi yang ada.

Secara ringkas model tersebut dituliskan sebagai berikut:

$$\text{Model selisih laba audit} = \frac{\text{laba nonaudited} - \text{laba audited}}{\text{Laba audited}}$$

Laba *nonaudited* : laba sebelum diaudit

Laba *audited* : laba setelah diaudit

Nilai model selisih laba audit positif menandakan bank melakukan *income maximization* (penaikan laba) dan sebaliknya.

Jika dibandingkan dengan model Beaver, model ini hanya mampu menghasilkan 14,29% hasil yang sama dengan hasil jika menggunakan model Beaver. Dalam hal ini, hasil yang sama menunjukkan bahwa bank tersebut melakukan tindakan manajemen laba dalam pola *income minimization* maupun *income maximization* bukan dalam hal nilai nominalnya (data terlampir).

Setelah melakukan perhitungan dengan menggunakan metode selisih laba audit ini, maka penulis mencoba melakukan analisis regresi antara nilai selisih laba audit sebagai proksi manajemen laba dengan variabel-variabel independen dalam penelitian ini. Hasil analisis regresi adalah sebagai berikut:

Tabel 4.17**Koefisien Determinasi Model Selisih Laba Audit****Model Summary^b**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.225 ^a	.051	-.011	.10023869542	2.000

a. Predictors: (Constant), LnSIZE, KDKI, KI, UK, UKA

b. Dependent Variable: Selisih Laba audit

Sumber: data penelitian yang diolah

Dari tabel 4.17 dapat dilihat bahwa model selisih laba audit memiliki koefisien determinasi (*adjusted R square*) sebesar -0.011. Nilai koefisien determinasi ini sangat kecil bahkan di bawah 0 dan merupakan nilai yang paling kecil dibandingkan model Beaver dan model selisih PPAP. Hal ini menandakan bahwa model ini tidak mampu menjelaskan pengaruh variabel komposisi dewan komisaris, ukuran dewan direksi, ukuran komite audit, kepemilikan institusional serta ukuran perusahaan terhadap manajemen laba.

Tabel 4.18**Uji Statistik F Model Selisih Laba Audit****ANOVA^b**

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	.041	5	.008	.822	.538 ^a
	Residual	.774	77	.010		
	Total	.815	82			

a. Predictors: (Constant), LnSIZE, KDKI, KI, UDK, UKA

b. Dependent Variable: Selisih Laba Audit

Sumber: Data penelitian yang diolah

Dari tabel 4.18 dapat dilihat bahwa nilai signifikansi adalah sebesar 0,538 ($\alpha > 0,05$). Hal ini menandakan bahwa dengan menggunakan model ini variabel komposisi dewan komisaris independen, ukuran dewan komisaris, ukuran komite audit, kepemilikan institusional serta ukuran perusahaan secara bersamaan tidak memiliki pengaruh secara signifikan terhadap manajemen laba. Hasil ini berbeda dibandingkan model Beaver dan model selisih PPAP yang menyimpulkan seluruh variabel independen dalam penelitian ini secara bersamaan memiliki pengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen.

Tabel 4.19
Uji Statistik t Model Selisih Laba Audit

Model		Coefficients ^a					Collinearity Statistics	
		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Tolerance	VIF
		B	Std. Error	Beta				
1	(Constant)	-.289	.249		-1.158	.251		
	KDKI	-.054	.090	-.070	-.605	.547	.928	1.078
	UDK	.001	.006	.028	.203	.840	.664	1.506
	UKA	-.006	.012	-.077	-.528	.599	.587	1.703
	KI	.070	.065	.151	1.079	.284	.632	1.582
	LnSIZE	.009	.009	.146	.994	.323	.568	1.759

a. Dependent Variable: Selisih
Laba audit

Sumber: Data penelitian yang diolah

Dari tabel 4.18 dapat dilihat bahwa nilai signifikansi dari masing-masing variabel independen adalah lebih besar dari 0,05. Hal ini menandakan

bahwa masing-masing variabel independen yaitu komposisi dewan komisaris independen, ukuran dewan komisaris, ukuran komite audit, kepemilikan institusional serta ukuran perusahaan secara parsial tidak mempengaruhi manajemen laba secara signifikan dengan menggunakan model selisih laba audit ini.



BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan analisis dan pembahasan yang telah dilakukan pada bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Komposisi dewan komisaris independen tidak memiliki pengaruh secara signifikan terhadap manajemen laba.
2. Ukuran dewan komisaris tidak memiliki pengaruh secara signifikan terhadap manajemen laba.
3. Ukuran komite audit memiliki pengaruh secara signifikan terhadap manajemen laba.
4. Kepemilikan institusional memiliki pengaruh secara signifikan terhadap manajemen laba.
5. Ukuran perusahaan tidak memiliki pengaruh secara signifikan terhadap manajemen laba.
6. Komposisi dewan komisaris independen, ukuran dewan komisaris, ukuran komite audit, kepemilikan institusional, serta ukuran perusahaan secara bersamaan memiliki pengaruh secara signifikan terhadap manajemen laba.

5.2. Saran

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, penulis mengemukakan beberapa saran yang diharapkan bermanfaat bagi berbagai pihak, yaitu:

1. Peneliti selanjutnya dapat mengembangkan model yang lebih tepat lagi untuk mendeteksi adanya tindakan manajemen laba yang dilakukan pada industri perbankan.
2. Peneliti selanjutnya dapat menggunakan variabel-variabel lain yang terkait dengan *good corporate governance* serta menambah rentang waktu penelitian agar hasil penelitian selanjutnya dapat semakin akurat, misalnya menambah variabel latar belakang dewan komisaris, persentase kehadiran dewan komisaris dalam rapat dengan manajemen bank serta menambah rentang waktu lebih dari empat tahun.
3. Peneliti selanjutnya dapat menambah jumlah sampel perusahaan perbankan dengan tidak hanya mengambil sampel perusahaan perbankan yang sudah *go public* saja, melainkan semua bank yang ada di Indonesia.
4. Perusahaan perbankan lebih meningkatkan peran atau fungsi monitoring dari dewan komisaris baik komisaris yang berasal dari dalam perusahaan maupun komisaris independen dikarenakan dalam penelitian ini peran dari dewan komisaris tidak mampu mengurangi tindakan manajemen laba. Peran dewan komisaris dapat ditingkatkan dengan meningkatkan kompetensi serta kehadirannya dalam rapat antara dewan komisaris dengan manajemen bank.

DAFTAR PUSTAKA

- Arafat, Wilson, (2007), *Peran BI Mewujudkan GCG Perbankan*, Artikel yang dimuat di Kompas tanggal 8 November 2007.
- Arif Ujiyantho, Muh dan Bambang Agus, (2006), *Mekanisme Corporate Governane, Manajemen Laba dan Kinerja Keuangan*, Artikel yang dipresentasikan pada Simposium Nasional Akuntansi 10 Makassar tanggal 26-28 Juli 2007.
- Badan Pengawas Pasar Modal,(2004), Kep-29/PM/2004, *Pembentukan dan Pedoman Kerja Komite Audit*.
- Bank Indonesia, (1998), *Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 31/147/KEP/DIR tentang Kualitas Aktiva Produktif*.
- Bank Indonesia, (1998), *Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 31/148/KEP/DIR tentang Pembentukan Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif*.
- Bank Indonesia, (2006), *Peraturan Bank Indonesia No. 8/4/PBI/2006 tentang Pelaksanaan Good Corporate Governance bagi Bank Umum*.
- Bank Indonesia, (2006), *Peraturan Bank Indonesia No. 8/14/PBI/2006 tentang Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia No. 8/4/PBI/2006 tentang Pelaksanaan Good Corporate Governance bagi Bank Umum*.
- Bank Indonesia, (2007), *Surat Edaran No. 9/12/DPNP Bank Indonesia kepada Bank Umum perihal Pelaksanaan Good Corporate Governance bagi Bank Umum*.
- Boediono, Gideon SB., (2005), *Kualitas Laba: Studi Pengaruh Mekanisme Corporate Governance dan Dampak Manajemen Laba dengan Menggunakan Analisis Jalur*. Artikel yang Dipresentasikan pada Simposium Nasional Akuntansi 8 Solo tanggal 15 - 16 September 2005.
- Daniri, Mas Achmad, (2006), *Good Corporate Governance, Konsep dan Penerapannya dalam Konteks Indonesia*, edisi kedua, Jakarta : PT. Ray Indonesia.
- Darmawati, Deni, (2003), *Corporate Governance dan Manajemen Laba: Suatu Studi Empiris*, Jurnal Bisnis dan Akuntansi Vol. 5 No. 1, hlm 47-68.
- Ghozali, Dr. Imam, (2001), *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS*, Semarang : Badan Penerbit Universitas Dipenogoro.

- Iqbal, Syaiful dan Nurul Fachriyah, (2007), *Corporate Governance sebagai Alat Pereda Praktik Manajemen Laba (Earnings Management)*, TEMA Vol. 8 No.1, hal 37-52.
- Isnanto, Rudi, (2008), *Pengaruh Corporate Governance dan Struktur Kepemilikan terhadap Manajemen Laba dan Kinerja Keuangan*, Yogyakarta : Universitas Islam Indonesia.
- Kasmir, SE.,MM, (2003), *Dasar-Dasar Perbanka.*, Jakarta : Rajawali Pers.
- Midiastuty, Pratana P., dan Mas'ud Machfoedz, 2003, *Analisis Hubungan Mekanisme Corporate Governance dan Indikasi Manajemen Laba*, Artikel yang Dipresentasikan pada Simposium Nasional Akuntansi 6 Surabaya tanggal 16-17 Oktober 2003.
- Nasution, Marihot dan Doddy Setiawan, 2007, *Pengaruh Corporate Governance terhadap Manajemen Laba di Industri Perbankan Indonesia*, Artikel yang dipresentasikan pada Simposium Nasional Akuntansi 10 Makassar tanggal 26-28 Juli 2007.
- National Committee on Corporate Governance (NCCG), 2001, *Indonesian Code for Good Corporate Governance*.
- Organization of Economic Cooperation and Development, (2004), “*OECD Principles of Corporate Governance.*”
- Scott, W.R, (2006), *Financial Accounting Theory*, New Jersey : Prentice Hall Inc.
- Sekaran, Uma, (2006), *Research Methods for Business*, Jakarta : Salemba Empat.
- Siamat, Dahlan, (2004), *Manajemen Lembaga Keuangan*, Jakarta : Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
- Veronica N.P Siregar, Sylvia dan Siddharta Utama, (2005), *Pengaruh Struktur Kepemilikan, Ukuran Perusahaan, dan Praktik Corporate Governance terhadap Pengelolaan Laba*, Simposium Nasional Akuntansi VIII, Ikatan Akuntan Indonesia.
- Wedari, Linda Kusumaning, (2004), *Analisis Pengaruh Proporsi Dewan Komisaris dan Keberadaan Komite Audit terhadap Aktivitas Manajemen Lab.*, Artikel yang Dipresentasikan pada Simposium Nasional Akuntansi 7 Denpasar tanggal 2 -3 Desember 2004.

Wilopo, (2004), *The Analysis of Relationship of Independent Board of Directors, Audit Committee, Corporate Performance, and Discretionary Accruals*, Ventura Volume 7 No. 1 April: 73-83.



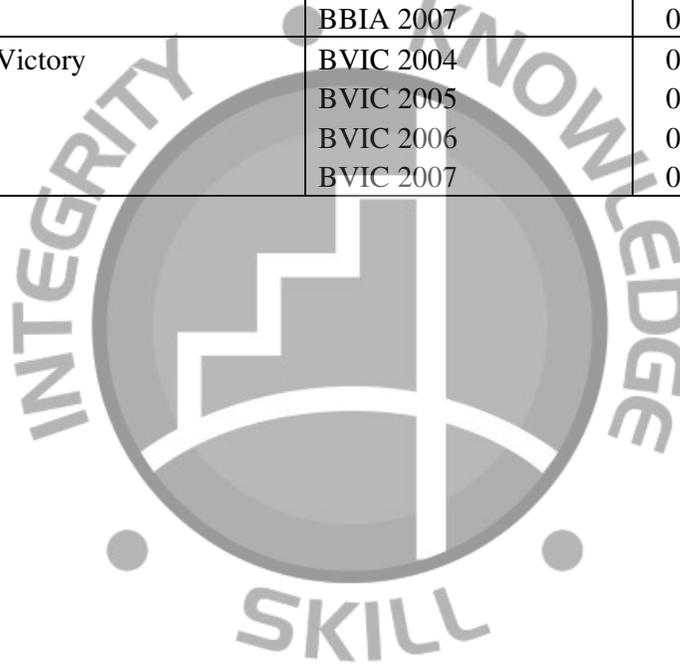
LAMPIRAN

Lampiran 1. Komposisi Dewan Komisaris Independen dan Ukuran Dewan Komisaris

Nama Bank	Kode Bank - Tahun	KDKI	UDK
Bank Central Asia	BBCA 2004	0.40	5
	BBCA 2005	0.40	5
	BBCA 2006	0.60	5
	BBCA 2007	0.60	5
Bank Internasional Indonesia	BNII 2004	0.40	10
	BNII 2005	0.40	10
	BNII 2006	0.50	10
	BNII 2007	0.50	8
Bank Nasional Indonesia	BBNI 2004	0.43	7
	BBNI 2005	0.43	7
	BBNI 2006	0.50	6
	BBNI 2007	0.43	7
Bank Rakyat Indonesia	BBRI 2004	0.50	4
	BBRI 2005	0.43	7
	BBRI 2006	0.57	7
	BBRI 2007	0.57	7
Bank Bumiputera	BABP 2004	0.33	3
	BABP 2005	0.40	5
	BABP 2006	0.60	5
	BABP 2007	0.50	6
Bank Century	BCIC 2004	0.50	4
	BCIC 2005	0.75	4
	BCIC 2006	0.50	4
	BCIC 2007	0.50	4
Bank Danamon	BDMN 2004	0.30	10
	BDMN 2005	0.33	9
	BDMN 2006	0.57	7
	BDMN 2007	0.57	7
Bank Inter Pacific/Arta Graha	INPC 2004	0.33	3
	INPC 2005	0.38	8
	INPC 2006	0.38	8
	INPC 2007	0.33	6

Bank Kesawan	BKSW 2004	0.33	3
	BKSW 2005	0.50	2
	BKSW 2006	0.33	3
	BKSW 2007	0.33	3
Bank Lippo	LPBN 2004	0.75	8
	LPBN 2005	0.71	7
	LPBN 2006	0.71	7
	LPBN 2007	0.71	7
Bank Mandiri	BMRI 2004	0.57	7
	BMRI 2005	0.43	7
	BMRI 2006	0.57	7
	BMRI 2007	0.71	7
Bank Mayapada	MAYA 2004	0.50	4
	MAYA 2005	0.40	5
	MAYA 2006	0.50	4
	MAYA 2007	0.50	4
Bank Mega	MEGA 2004	0.33	3
	MEGA 2005	0.25	4
	MEGA 2006	0.67	3
	MEGA 2007	0.67	3
Bank Niaga	BNGA 2004	0.43	7
	BNGA 2005	0.56	9
	BNGA 2006	0.50	8
	BNGA 2007	0.60	5
Bank NISP	NISP 2004	0.56	9
	NISP 2005	0.30	10
	NISP 2006	0.40	10
	NISP 2007	0.50	8
Bank Nusantara Parahyangan	BBNP 2004	0.33	3
	BBNP 2005	0.33	3
	BBNP 2006	0.33	3
	BBNP 2007	0.50	6
Bank Panin	PNBN 2004	0.40	5
	PNBN 2005	0.50	6
	PNBN 2006	0.50	4
	PNBN 2007	0.50	4

Bank Permata	BNLI 2004	0.30	10
	BNLI 2005	0.30	10
	BNLI 2006	0.50	8
	BNLI 2007	0.50	8
Bank Swadesi	BSWD 2004	0.50	4
	BSWD 2005	0.50	4
	BSWD 2006	0.50	4
	BSWD 2007	0.50	4
Bank UOB Buana	BBIA 2004	0.50	4
	BBIA 2005	0.25	4
	BBIA 2006	0.20	5
	BBIA 2007	0.20	5
Bank Victory	BVIC 2004	0.50	2
	BVIC 2005	0.50	2
	BVIC 2006	0.33	3
	BVIC 2007	0.67	3

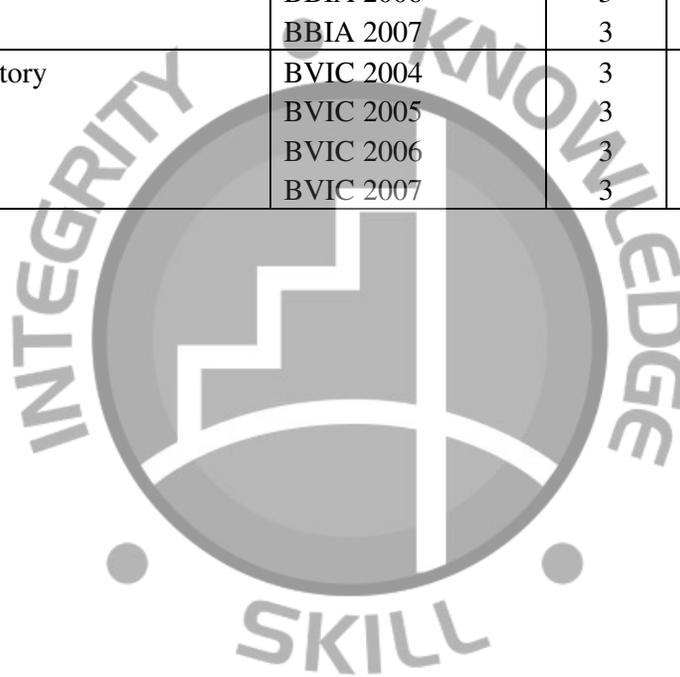


**Lampiran 2. Ukuran Komite Audit, Kepemilikan Institusional dan
Logaritma Natural Ukuran Perusahaan.**

Nama Bank	Kode Bank - Tahun	UKA	KI	LnSIZE
Bank Central Asia	BBCA 2004	3	0.5125	32.636
	BBCA 2005	3	0.5118	32.643
	BBCA 2006	3	0.5115	32.806
	BBCA 2007	3	0.5115	33.016
Bank Internasional Indonesia	BNII 2004	5	0.5688	30.179
	BNII 2005	5	0.5678	30.642
	BNII 2006	5	0.5633	31.603
	BNII 2007	5	0.5585	31.641
Bank Nasional Indonesia	BBNI 2004	7	0.9912	32.548
	BBNI 2005	8	0.9748	32.627
	BBNI 2006	7	0.9748	32.763
	BBNI 2007	6	0.7494	32.836
Bank Rakyat Indonesia	BBRI 2004	5	0.5907	32.304
	BBRI 2005	6	0.5816	32.441
	BBRI 2006	5	0.5697	32.673
	BBRI 2007	6	0.5683	32.948
Bank Bumiputera	BABP 2004	3	0.4102	28.967
	BABP 2005	3	0.5832	29.094
	BABP 2006	3	0.6707	29.320
	BABP 2007	3	0.6707	29.479
Bank Century	BCIC 2004	3	0.1853	29.692
	BCIC 2005	2	0.1450	30.217
	BCIC 2006	3	0.1150	30.308
	BCIC 2007	3	0.1132	30.306
Bank Danamon	BDMN 2004	4	0.6575	31.706
	BDMN 2005	6	0.6960	31.848
	BDMN 2006	4	0.6925	32.039
	BDMN 2007	6	0.6805	32.124
Bank Inter Pacific/Arta Graha	INPC 2004	3	0.4348	29.810
	INPC 2005	3	0.3174	30.015
	INPC 2006	2	0.3024	30.033
	INPC 2007	3	0.2592	30.054

Bank Kesawan	BKSW 2004	3	0.8003	28.059
	BKSW 2005	3	0.6396	28.064
	BKSW 2006	3	0.6403	28.350
	BKSW 2007	3	0.6403	28.412
Bank Lippo	LPBN 2004	4	0.5205	30.957
	LPBN 2005	5	0.8752	31.002
	LPBN 2006	3	0.8676	31.138
	LPBN 2007	5	0.8703	31.294
Bank Mandiri	BMRI 2004	3	0.6954	33.145
	BMRI 2005	5	0.6910	33.205
	BMRI 2006	5	0.6786	33.220
	BMRI 2007	5	0.6747	33.396
Bank Mayapada	MAYA 2004	3	0.2647	28.570
	MAYA 2005	3	0.2647	28.780
	MAYA 2006	3	0.2647	28.939
	MAYA 2007	3	0.2443	29.130
Bank Mega	MEGA 2004	3	0.5728	30.556
	MEGA 2005	3	0.5728	30.854
	MEGA 2006	3	0.5220	31.064
	MEGA 2007	3	0.5522	31.184
Bank Niaga	BNGA 2004	3	0.5300	31.058
	BNGA 2005	3	0.6400	31.359
	BNGA 2006	4	0.6400	31.471
	BNGA 2007	4	0.6313	31.636
Bank NISP	NISP 2004	2	0.2250	30.515
	NISP 2005	3	0.7229	30.629
	NISP 2006	3	0.7235	30.818
	NISP 2007	4	0.7240	30.997
Bank Nusantara Parahyangan	BBNP 2004	3	0.1580	28.474
	BBNP 2005	3	0.1580	28.675
	BBNP 2006	3	0.1499	28.840
	BBNP 2007	3	0.5568	28.959
Bank Panin	PNBN 2004	3	0.4218	30.806
	PNBN 2005	3	0.4218	31.240
	PNBN 2006	3	0.4510	31.333
	PNBN 2007	3	0.4485	31.610

Bank Permata	BNLI 2004	4	0.3155	31.089
	BNLI 2005	4	0.3155	31.180
	BNLI 2006	5	0.4500	31.264
	BNLI 2007	3	0.4450	31.302
Bank Swadesi	BSWD 2004	4	0.3952	27.443
	BSWD 2005	4	0.3952	27.554
	BSWD 2006	4	0.4900	27.603
	BSWD 2007	4	0.7600	27.786
Bank UOB Buana	BBIA 2004	3	0.4353	30.425
	BBIA 2005	3	0.6110	30.404
	BBIA 2006	3	0.6113	30.456
	BBIA 2007	3	0.6113	30.536
Bank Victory	BVIC 2004	3	0.1319	28.327
	BVIC 2005	3	0.1907	28.379
	BVIC 2006	3	0.2277	28.695
	BVIC 2007	3	0.3466	29.293

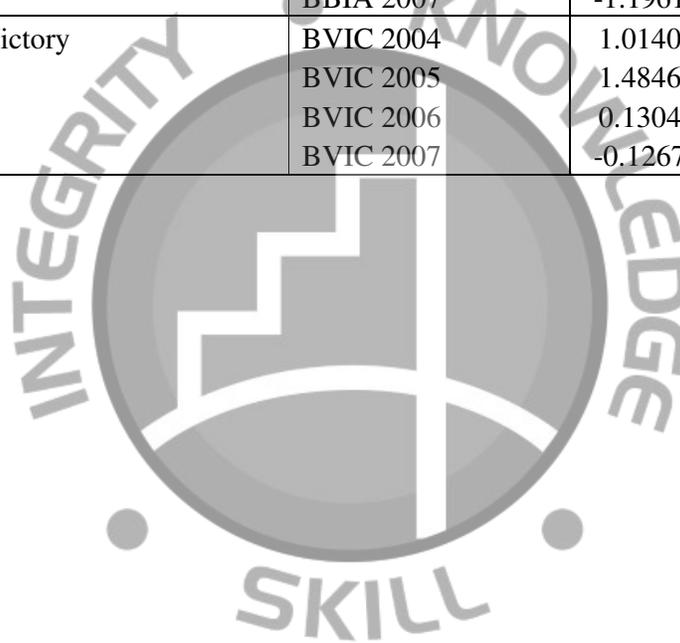


Lampiran 3. Nilai *Discretionary Accrual*.

Nama Bank	Kode Bank - Tahun	DA
Bank Central Asia	BBCA 2004	-0.78731
	BBCA 2005	-0.73949
	BBCA 2006	-0.58317
	BBCA 2007	-0.69383
Bank Internasional Indonesia	BNII 2004	-0.79352
	BNII 2005	-0.64579
	BNII 2006	-0.11274
	BNII 2007	-0.06973
Bank Nasional Indonesia	BBNI 2004	0.58080
	BBNI 2005	0.59890
	BBNI 2006	0.23104
	BBNI 2007	0.77552
Bank Rakyat Indonesia	BBRI 2004	1.90258
	BBRI 2005	1.76429
	BBRI 2006	1.72139
	BBRI 2007	1.51808
Bank Bumiputera	BABP 2004	-0.08035
	BABP 2005	2.99855
	BABP 2006	-0.85542
	BABP 2007	-0.32146
Bank Century	BCIC 2004	-1.48166
	BCIC 2005	-0.92511
	BCIC 2006	-1.43724
	BCIC 2007	-1.54312
Bank Danamon	BDMN 2004	0.33202
	BDMN 2005	-0.46636
	BDMN 2006	-0.23523
	BDMN 2007	-0.27949
Bank Inter Pacific/Arta Graha	INPC 2004	-0.08902
	INPC 2005	0.70625
	INPC2006	0.58817
	INPC 2007	0.77771

Bank Kesawan	BKSW 2004	0.80885
	BKSW 2005	-1.57152
	BKSW 2006	-1.39794
	BKSW 2007	-1.25717
Bank Lippo	LPBN 2004	0.74166
	LPBN 2005	0.29087
	LPBN 2006	-0.33352
	LPBN 2007	-0.76361
Bank Mandiri	BMRI 2004	1.24802
	BMRI 2005	0.89543
	BMRI 2006	1.99412
	BMRI 2007	1.80449
Bank Mayapada	MAYA 2004	-0.46749
	MAYA 2005	-0.40455
	MAYA 2006	-0.24931
	MAYA 2007	-1.08856
Bank Mega	MEGA 2004	-0.67456
	MEGA 2005	-0.37379
	MEGA 2006	-0.78870
	MEGA 2007	-0.96170
Bank Niaga	BNGA 2004	0.96698
	BNGA 2005	-0.55882
	BNGA 2006	-0.36323
	BNGA 2007	0.11396
Bank NISP	NISP 2004	-0.35078
	NISP 2005	-0.73875
	NISP 2006	-0.80904
	NISP 2007	-0.97090
Bank Nusantara Parahyangan	BBNP 2004	1.20830
	BBNP 2005	0.48163
	BBNP 2006	-0.72442
	BBNP 2007	-0.63443
Bank Panin	PNBN 2004	0.26856
	PNBN 2005	0.54338
	PNBN 2006	-0.00141
	PNBN 2007	-0.81247

Bank Permata	BNLI 2004	2.05042
	BNLI 2005	1.18825
	BNLI 2006	0.45614
	BNLI 2007	0.91709
Bank Swadesi	BSWD 2004	0.30834
	BSWD 2005	-0.23378
	BSWD 2006	-0.12370
	BSWD 2007	-0.27202
Bank UOB Buana	BBIA 2004	-1.12562
	BBIA 2005	-0.83375
	BBIA 2006	-1.06240
	BBIA 2007	-1.19612
Bank Victory	BVIC 2004	1.01400
	BVIC 2005	1.48465
	BVIC 2006	0.13040
	BVIC 2007	-0.12673



Lampiran 4. Perbandingan Model Beaver dan Model Selisih PPAP

Kode Bank-Tahun	DA	Selisih PPAP	Cek
BBCA 2004	-0.78731	-0.42001	v
BBCA 2005	-0.73949	-0.18674	v
BBCA2006	-0.58317	-0.26956	v
BBCA2007	-0.69383	-0.17480	v
BNII 2004	-0.79352	-0.18952	v
BNII 2005	-0.64579	-0.10666	v
BNII 2006	-0.11274	-0.08624	v
BNII 2007	-0.06973	-0.08374	v
BBNI 2004	0.58080	-0.37201	
BBNI 2005	0.59890	-0.02237	
BBNI 2006	0.23104	0.00000	
BBNI 2007	0.77552	0.25924	+
BBRI 2004	1.90258	-0.55701	
BBRI 2005	1.76429	-0.43380	
BBRI 2006	1.72139	-0.35884	
BBRI 2007	1.51808	-0.37966	
BABP 2004	-0.08035	-0.16445	v
BABP 2005	2.99855	-0.07105	
BABP 2006	-0.85542	-0.04765	v
BABP 2007	-0.32146	-0.03960	v
BCIC 2004	-1.48166	-0.04180	v
BCIC 2005	-0.92511	-0.11351	v
BCIC 2006	-1.43724	-0.28251	v
BCIC 2007	-1.54312	-0.05521	v
BDMN 2004	0.33202	-0.27373	
BDMN 2005	-0.46636	-0.05566	v
BDMN 2006	-0.23523	-0.03214	v
BDMN 2007	-0.27949	-0.12504	v
INPC 2004	-0.08902	-0.14275	v
INPC 2005	0.70625	-0.07082	
INPC 2006	0.58817	-0.02240	
INPC 2007	0.77771	-0.00054	
BKSW 2004	0.80885	0.00000	
BKSW 2005	-1.57152	-0.16500	v
BKSW 2006	-1.39794	0.00000	
BKSW 2007	-1.25717	-0.01721	v

LPBN 2004	0.74166	-0.40007	
LPBN 2005	0.29087	-0.61031	
LPBN 2006	-0.33352	-0.32063	v
LPBN 2007	-0.76361	-0.12574	v
BMRI 2004	1.24802	-0.24723	
BMRI 2005	0.89543	-0.02859	
BMRI 2006	1.99412	-0.07262	
BMRI 2007	1.80449	-0.04047	
MAYA 2004	-0.46749	-0.34039	v
MAYA 2005	-0.40455	-0.18598	v
MAYA 2006	-0.24931	-0.09033	v
MAYA 2007	-1.08856	0.00000	
MEGA 2004	-0.67456	0.00000	
MEGA 2005	-0.37379	0.00000	
MEGA 2006	-0.78870	0.00000	
MEGA 2007	-0.96170	0.00000	
BNGA 2004	0.96698	-0.39358	
BNGA 2005	-0.55882	-0.13424	v
BNGA 2006	-0.36323	-0.13018	v
BNGA 2007	0.11396	-0.11690	
NISP 2004	-0.35078	-0.10094	v
NISP 2005	-0.73875	0.00000	
NISP 2006	-0.80904	-0.00101	v
NISP 2007	-0.97090	-0.00061	v
BBNP 2004	1.20830	-0.65836	
BBNP 2005	0.48163	-0.43357	
BBNP 2006	-0.72442	-0.25346	v
BBNP 2007	-0.63443	-0.21594	v
PNBN 2004	0.26856	0.00000	
PNBN 2005	0.54338	0.00000	
PNBN 2006	-0.00141	0.00000	
PNBN 2007	-0.81247	0.00000	
BNLI 2004	2.05042	-0.50798	
BNLI 2005	1.18825	-0.30701	
BNLI 2006	0.45614	-0.24161	
BNLI 2007	0.91709	-0.15132	
BSWD 2004	0.30834	-0.49958	
BSWD 2005	-0.23378	-0.55210	v
BSWD 2006	-0.12370	-0.45248	v
BSWD 2007	-0.27202	-0.49288	v

BBIA 2004	-1.12562	-0.00011	v
BBIA 2005	-0.83375	-0.03714	v
BBIA 2006	-1.06240	-0.10463	v
BBIA 2007	-1.19612	-0.00765	v
BVIC 2004	1.01400	-0.04487	
BVIC 2005	1.48465	0.00000	
BVIC 2006	0.13040	-0.07711	
BVIC 2007	-0.12673	-0.49880	v

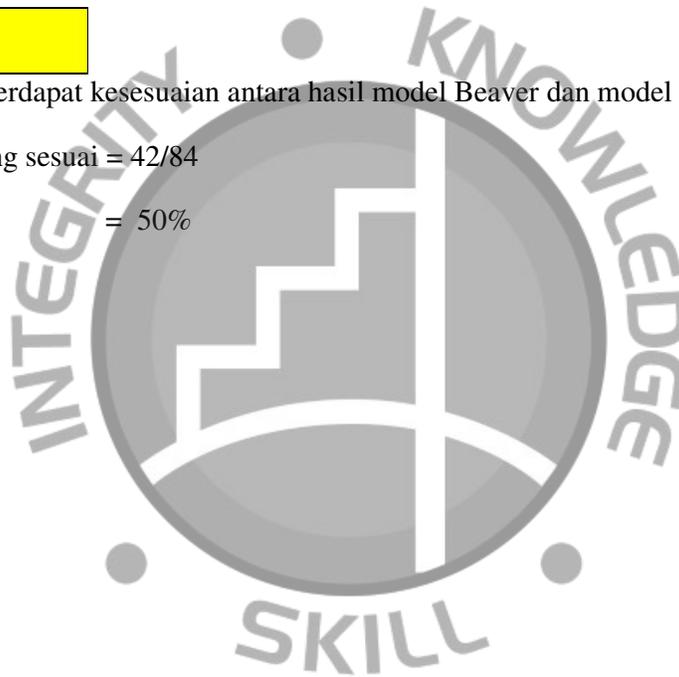
Keterangan :



Berarti terdapat kesesuaian antara hasil model Beaver dan model selisih PPAP.

Data yang sesuai = 42/84

= 50%



Lampiran 5. Perbandingan Model Beaver dan Model Selisih Laba Audit

Kode Bank - Tahun	DA	Selisih Laba Audit	Cek
BBCA 2004	-0.78731	0.0000000000	
BBCA 2005	-0.73949	0.0000000000	
BBCA 2006	-0.58317	0.0000000000	
BBCA 2007	-0.69383	0.0000000000	
BNII 2004	-0.79352	0.0000000000	
BNII 2005	-0.64579	0.0000000000	
BNII 2006	-0.11274	0.0000000000	
BNII 2007	-0.06973	0.0000000000	
BBNI 2004	0.58080	0.0156700000	v
BBNI 2005	0.59890	0.0000000000	
BBNI 2006	0.23104	0.0000000000	
BBNI 2007	0.77552	0.0000000000	
BBRI 2004	1.90258	0,0798000000	v
BBRI 2005	1.76429	0.0000000000	
BBRI 2006	1.72139	0.0000000000	
BBRI 2007	1.51808	0.0000000000	
BABP 2004	-0.08035	0.0000000000	
BABP 2005	2.99855	0.0000000000	
BABP 2006	-0.85542	-0.0001261511	v
BABP 2007	-0.32146	0.0000484330	
BCIC 2004	-1.48166	0.0000000000	
BCIC 2005	-0.92511	0.0000897420	
BCIC 2006	-1.43724	-0.0000280954	v
BCIC 2007	-1.54312	-0.0000175610	v
BDMN 2004	0.33202	0.0000000000	
BDMN 2005	-0.46636	0.0000000000	
BDMN 2006	-0.23523	0.0000000000	
BDMN 2007	-0.27949	0.0000000000	
INPC 2004	-0.08902	-0.0001379058	v
INPC 2005	0.70625	0.0001772243	v
INPC 2006	0.58817	0.0028782313	v
INPC 2007	0.77771	0.0000000000	
BKSW 2004	0.80885	0.0000000000	
BKSW 2005	-1.57152	0.0000000000	
BKSW 2006	-1.39794	0.0000000000	
BKSW 2007	-1.25717	0.0000000000	

LPBN 2004	0.74166	0.0000000000	
LPBN 2005	0.29087	0.0000000000	
LPBN 2006	-0.33352	0.0000000000	
LPBN 2007	-0.76361	0.0000000000	
BMRI 2004	1.24802	0.0000000000	
BMRI 2005	0.89543	0.0000000000	
BMRI 2006	1.99412	0.0000000000	
BMRI 2007	1.80449	0.0000000000	
MAYA 2004	-0.46749	-0.8939990325	v
MAYA 2005	-0.40455	0.0000000000	
MAYA 2006	-0.24931	0.0000000000	
MAYA 2007	-1.08856	0.0000000000	
MEGA 2004	-0.67456	-0.0244863973	v
MEGA 2005	-0.37379	0.0000000000	
MEGA 2006	-0.78870	0.0000000000	
MEGA 2007	-0.96170	0.0000000000	
BNGA 2004	0.96698	0.0000000000	
BNGA 2005	-0.55882	0.0000000000	
BNGA 2006	-0.36323	0.0000000000	
BNGA 2007	0.11396	0.0000000000	
NISP 2004	-0.35078	-0.0000034366	v
NISP 2005	-0.73875	0.0000000000	
NISP 2006	-0.80904	0.0000000000	
NISP 2007	-0.97090	0.0000000000	
BBNP 2004	1.20830	0.0000035766	
BBNP 2005	0.48163	0.0000297899	
BBNP 2006	-0.72442	-0.0001022290	v
BBNP 2007	-0.63443	0.0000310204	
PNBN 2004	0.26856	0.0000000000	
PNBN 2005	0.54338	0.0000000000	
PNBN 2006	-0.00141	0.0000000000	
PNBN 2007	-0.81247	0.0000000000	
BNLI 2004	2.05042	0.0000000000	
BNLI 2005	1.18825	0.0000000000	
BNLI 2006	0.45614	0.0000000000	
BNLI 2007	0.91709	-0.0000020039	
BSWD 2004	0.30834	-0.0164964434	
BSWD 2005	-0.23378	0.0246275756	
BSWD 2006	-0.12370	0.0000000000	
BSWD 2007	-0.27202	0.0000000000	

BBIA 2004	-1.12562	0.0000000000	
BBIA 2005	-0.83375	0.0000000000	
BBIA 2006	-1.06240	0.0000000000	
BBIA 2007	-1.19612	0.0000000000	
BVIC 2004	1.01400	-0.1656908055	
BVIC 2005	1.48465	-0.0232957976	
BVIC 2006	0.13040	-0.0233774902	
BVIC 2007	-0.12673	0.0054817870	

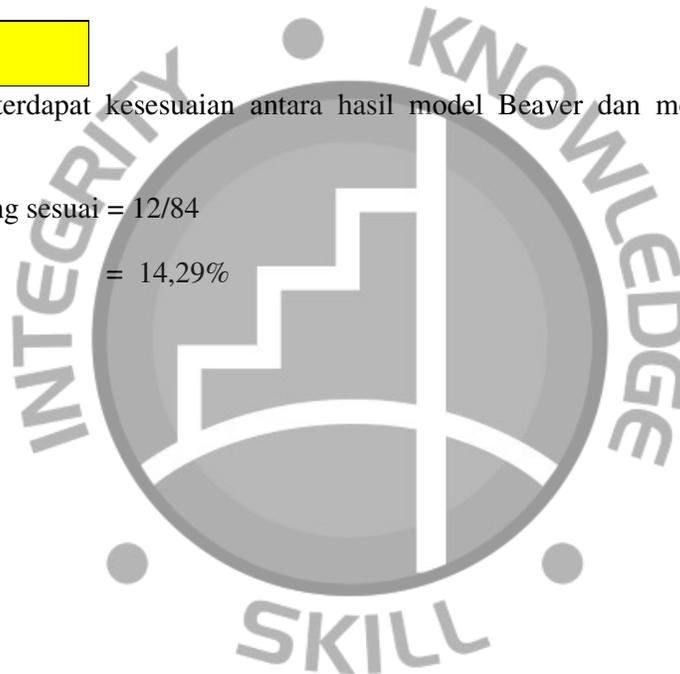
Keterangan :



Berarti terdapat kesesuaian antara hasil model Beaver dan model selisih laba audit.

Data yang sesuai = 12/84

= 14,29%



DAFTAR RIWAYAT HIDUP



I. DATA PRIBADI

Nama Lengkap : Markus Triyantoro
Tempat / Tgl Lahir : Depok, 7 Mei 1988
Agama : Katolik
Alamat : Jl. Stasiun Depok Lama No. 6, Rt.01/02
Depok, 16431

II. PENDIDIKAN FORMAL

2005 - 2009 : STIE Indonesia Banking School
2002 - 2005 : SMUN 1 Depok
1999 - 2002 : SMPN 2 Depok
1993 - 1999 : SDN Pancoranmas 4 Depok
1992 - 1993 : TK Mutiara Depok

III. PENDIDIKAN INFORMAL (PELATIHAN DAN SEMINAR)

1. Pelatihan Sertifikasi Manajemen Risiko Tingkat 1, Mei 2009.
2. Pelatihan *Trade Finance* pada 21-23 Januari 2009.
3. Pelatihan *Bourse Game Treasury* pada 29-30 Januari 2008.
4. Pelatihan Analisis Kredit pada 20-22 Agustus 2007.
5. Pelatihan *Super Activist Training* oleh Matermind Cosulting pada 25 April 2007.

6. Pelatihan *Customer Service Excellence* pada 30 Januari – 1 Februari 2007 dari *First Asia Consultant*.
7. Kegiatan *Islamic Economic Study Club* periode 2006 – 2007.
8. Magang pada BRI Banyuputih, Batang – Jawa Tengah pada 12 – 16 Juni 2006.
9. Pelatihan *Service Excellence* pada 1-2 Februari 2006.

IV. PENGALAMAN ORGANISASI

- 2005 – 2006 Wakil Ketua UKM Paduan Suara STIE Indonesia Banking School
- 2006 – 2007 Senat Mahasiswa STIE Indonesia Banking School sebagai Pelaksana II Divisi Penalaran.
- 2005 – 2007 Divisi Internal Lecturer Islamic Economic Study Club
- 2007 Kegiatan Program Orientasi Mahasiswa STIE IBS 2007 sebagai Ketua Pelaksana.
- 2007 Kegiatan IBS Big Event Point 2007 sebagai panitia Sie Acara Akuntansi.
- 2007 – 2008 Dewan Mahasiswa STIE Indonesia Banking School sebagai Pelaksana Divisi Pengabdian Masyarakat.
- 2008 Kegiatan Indonesia Bright Supersound sebagai Koordinator Acara